



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA 2014 - 2018

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 dapat disusun dengan baik sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan dan langkah awal untuk pelaksanaan dan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.

Besar harapan kami, penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dapat bermanfaat sebagai referensi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika di Sumatera Utara yang lebih terarah, efektif, dan berdaya guna untuk meningkatkan daya saing perekonomian Sumatera Utara.

Medan, Januari 2014
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Provinsi Sumatera Utara,

Drs. Jumsadi Damanik, SH.,
M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19591028 198303 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumber Daya SKPD	30
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	39
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3 Telaahan Renstra	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	59
BAB IV VISI, MISI, STRATEGI, KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Visi dan Misi SKPD	62
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	65
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	68
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	80
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	83
BAB VII PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja 2012 berdasarkan IKU	37
Tabel 1.2 Pengukuran Kinerja 2012 berdasarkan Program / kegiatan	38
Tabel T-IV.C.15 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	58
Tabel 5.1 Hubungan Hierarkis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	67
Tabel 6.1 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi-1	69
Tabel 6.2 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi-2	70
Tabel 6.3 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi-	73
Tabel 6.4 Hubungan antara Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi- 4	75

1.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas masing-masing. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan sebagaimana diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyiapkan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 7 Ayat 1). Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 ayat 4).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud, menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam merencanakan pembangunan 5 tahun ke depan.

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi (*information society*) atau masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based society*) yang berdaya saing.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara antara lain :

1. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Undang-Undang Nomor RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11/2005 tentang LPP;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12/2005 tentang LPP RRI;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13/2005 tentang LPP TVRI;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 49/2005 tentang LP Asing;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50/2005 tentang LP Swasta;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51/2005 tentang LP Komunitas;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52/2005 tentang LP Berlangganan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 03/2007 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pemda;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
29. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
30. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
31. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknologi Informasi
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 02/PER/M, Kominfo/3/2008 tentang Pedoman dan Penggunaan Menara Bersama;
33. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Syarat Izin Penyiaran;
34. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Syarat Izin Penyiaran;
35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
36. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PermenKominfo Nomor 48 tahun 2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan;
37. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;

38. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPMMD No. 18/2009 – No. 07/PRT/M/2009 – 19/PER/M.Kominfo/03/2009 – No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Menara Telekomunikasi;
39. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 /2009 tentang Menara Telekomunikasi Bersama;
43. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9/2008 tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu;
44. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2/2007 tentang Penataan Menara;
45. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
46. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2012 tentang e-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
3. Memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun kedepan.
4. Memberi acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tahun 2018.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar dalam mewujudkan masyarakat informasi (*information society*) atau masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based society*) yang berdaya saing di Sumatera Utara;
3. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja.

4. Menciptakan rasa tanggung jawab yang mendorong komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika pada semua tingkatan.
5. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai suatu organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih dimasa depan, agar eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis.
6. Menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama.
7. Mengembangkan sifat yang fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang dimungkinkan akan mempengaruhi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai suatu organisasi.
8. Memberikan jaminan yang konkret, jelas, dan logis, baik kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Membangun sifat antisipatif dan korektif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga akan mendorong sifat proaktif dalam bergerak

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014–2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Tugas dan fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas di Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan/kewenangan Provinsi). Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hierarkis disusun struktur organisasi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Aplikasi Telematika
4. Bidang Pos Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa
5. Bidang Hubungan Kelembagaan dan Pendapat Umum
6. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi dibidang kebijakan teknis aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desiminasi, pos, telekomunikasi, data informasi dan bina media massa serta tugas pembantuan.

Untuk itu melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desiminasi, pos, telekomunikasi, data informasi dan bina media massa;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, diseminasi, pos, telekomunikasi, data informasi dan bina media massa;
3. Penyelenggaraan pemberian perijinan di bidang komunikasi informasi dan telematika;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informasi dan telematika;
5. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informasi dan telematika;
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan, sinkronisasi, mengendalikan tugas dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Menyelenggarakan faslitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program aplikasi telematika, pendapat umum dan hubungan kelembagaan, sarana komunikasi diseminasi dan informasi, pos dan telekomunikasi;

- f. Menyelenggarakan pembelian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai komunikasi dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai uraian tugas

- a. Menyelenggarakan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan program kerja pada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu;
- b. Menyelenggarakan pembagian tugas kepada kepala sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Program, sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- c. Menyelenggarakan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan/umum, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan penataan organisasi ketatalaksanaan, hukum dan penusunan program, monitoring dan evaluasi;
- e. Menyelenggarakan penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan di bidang kerumahtanggaan/umum, surat meyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program jangka menengah, tahunan Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- h. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;

- j. Menyelenggarakan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- k. Menyelenggarakan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- l. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai standar yang ditetapkan;

B.1 Sub Bagian Umum

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program.

Sub bagian Umum mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan / program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan, masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ struktural, fungsional dan teknis;
- e. Melaksanakan penyusunan/ penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai, pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- f. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan pembinaan tenaga fungsional;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- k. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- l. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- m. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan layanan kantor;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- r. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- s. Melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

B.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;

- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- d. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;
- e. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

B.3 Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan data / bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan SuB Bagian Program;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan / program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program yang meliputi pengembangan komunikasi dan informasi;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ dan LPPD Dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Aplikasi Telematika

Bidang Aplikasi Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, pedoman dan prosedur di bidang informasi publik, e-governance dan Aplikasi, serta pemberdayaan telematika, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.

C.1. Kepala Bidang Aplikasi Telematika

Kepala Bidang Aplikasi Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pusat Informasi Publik, e-Governance dan Aplikasi serta Pemberdayaan Telematika;
- b. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Pusat Informasi Publik, e-Governance dan Aplikasi serta Pemberdayaan Telematika;
- c. Penyelenggaraan penyusunan standar, pedoman dan prosedur di bidang Pusat Informasi Publik, e-Governance dan Aplikasi serta Pemberdayaan Telematika;
- d. Penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi;
- e. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang di bidang Pusat Informasi Publik, e-Governance dan Aplikasi serta Pemberdayaan Telematika.

C.1.1. Kepala Seksi Pusat Informasi Publik

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, bidang Aplikasi Telematika dibantu oleh Seksi Pusat Informasi Publik, Seksi Pelayanan e-Governance Standarisasi dan Aplikasi, Seksi Pemberdayaan Telematika.

Kepala Seksi Pusat Informasi Publik mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pelayanan informasi publik;

- b. Melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik;
- c. Melaksanakan peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat;
- e. Melaksanakan pelayanan informasi melalui media online;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pemuktahiran data Website Sumut Online;
- g. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan fasilitasi melalui audio visual, media cetak, layanan informasi / media center dan bank data;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Telematika;
- k. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Aplikasi Telematika;
- l. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Aplikasi Telematika.

C.1.2. Kepala Seksi Pelayanan e-Governance Standarisasi dan Aplikasi

Kepala Seksi Pelayanan e-Governance Standarisasi dan Aplikasi mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja tahunan pelayanan e-Governance dan standarisasi aplikasi;
- b. Melaksanakan pengembangan penyelenggaraan ke pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Melaksanakan perumusan, dan menetapkan standarisasi aplikasi untuk memudahkan proses kerja yang efisien dan efektif;

- d. Melaksanakan peningkatan pelayanan e-governance dengan merata sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Melaksanakan pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar lembaga;
- f. Melaksanakan penyediaan informasi dan pelayanan publik secara online;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Telematika;
- j. Melaksanakan Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Aplikasi Telematika.

C.1.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Telematika

Kepala Seksi Pemberdayaan Telematika mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja tahunan pemberdayaan telematika;
- b. Melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan piranti lunak aplikasi telematika untuk meningkatkan proses kerja pemerintahan dalam pelayanan publik;
- c. Melaksanakan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik;
- d. Melaksanakan pemberdayaan telematika untuk meningkatkan peran serta dunia usaha;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Telematika;
- h. Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Aplikasi Telematika;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Aplikasi Telematika

D. Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan

Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Perencanaan Operasional Kegiatan Program kerja, pembagian Tugas Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan.

D.1. Kepala Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan menyusun Program Kerja Tahunan dan lima tahunan Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan;
- b. penyelenggaraan perencanaan operasional pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga yang berpedoman pada program kerja bidang;
- c. penyelenggaraan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pengarahan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- e. penyelenggaraan pengumpulan, mengelola, menyiapkan dan menyajikan bahan/data untuk penunjang program kerjasama lembaga kehumasan;
- f. penyelenggaraan pelatihan atau workshop kehumasan, pertemuan dan anjungsana;

- g. penyelenggaraan pengkoordinasian seluruh Pemberitaan Pemerintah Lintas Sektor dan Instansi Vertikal yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, BAKOHUMAS serta Lembaga Kemasyarakatan, dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- h. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan program pemerintah;
- i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

D.1.1. Kepala Seksi Bina Pendapat Umum

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan dibantu oleh Seksi Bina Pendapat Umum, Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan dan Seksi Hubungan Lembaga dan Kemitraan.

Kepala Seksi Bina Pendapat Umum, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penanganan Apresiasi Publik, Jumpa Publik/Forum Dialog, Polling, Penanganan Unjuk Rasa, Pengumpulan Isu-isu dari Media Massa, Cetak maupun Elektronik. Melaksanakan analisis dan pengkajian atas isu krusial dan mengeluarkan draf informasi aktual *class action* dan hak jawab atas isu krusial bekerjasama dengan Perguruan Tinggi;
- b. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengarahan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan;
- h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan ;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pendapat Umm dan Hubungan Kelembagaan.

D.1.2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan

Kepala Seksi dan Perpustakaan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pendokumentasian seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk produk dari setiap Bidang dan Sekretariat;
- b. melaksanakan pelayanan informasi perpustakaan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh seluruh Bidang dan Sekretariat;
- c. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengarahan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- e. melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan;
- i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan.

D.1.3. Kepala Seksi Hubungan Lembaga dan Kemitraan

Kepala Seksi Hubungan Lembaga dan Kemitraan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan operasional Bakohumas;
- b. melaksanakan *coffee morning* dengan lembaga dan mitra lainnya;
- c. melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Pers dan Penerbitan Media;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi informatika dan komunikasi Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pengarahan dan memantau pelaksanaan tugas bawahan;
- g. melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan tugas bawahan dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pendapat Umum dan Hubungan Kelembagaan

E. Bidang Sarana Komunikasi Diseminasi dan Informasi

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

E.1. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan standarisasi kebijakan teknis pada bidang Komunikasi Sosial, Media Cetak, Media Penyiaran, Media Pameran, Lembaga-lembaga Informasi dan Media Luar Ruang;
- b. penyelenggaraan perencanaan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang pada Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- c. penyelenggaraan perencanaan materi sosialisasi dan diseminasi melalui komunikasi sosial, media cetak, media pameran, media penyiaran, media luar ruang dan lembaga-lembaga informasi lainnya;
- d. penyelenggaraan koordinasi dengan stakeholder dalam penetapan materi sosialisasi dan diseminasi;
- e. penyelenggaraan pemberian masukan/saran kepada Kepala Dinas;
- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

E.1.1. Kepala Seksi Komunikasi Sosial

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dibantu oleh Seksi Komunikasi Sosial, Seksi Penerbitan, Publikasi dan Pameran dan Seksi Penyiaran. Kepala Seksi Komunikasi Sosial mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pertunjukan media tradisional di televisi;
- b. melaksanakan pertunjukan media tradisional di Kabupaten/Kota;

- c. melaksanakan koordinasi dan kelompok informasi masyarakat dengan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka penyebaran informasi;
- d. melaksanakan pemberian pembinaan kepada kelompok informasi dan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka pemberdayaannya untuk meneruskan informasi kepada masyarakat lingkungannya;
- e. melaksanakan sosialisasi informasi melalui Mobil Unit Siaran;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- i. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

E.1.2. Kepala Seksi Penerbitan, Publikasi dan Pameran

Kepala Seksi Penerbitan, Publikasi dan Pameran mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan berbagai penerbitan untuk sosialisasi informasi;
- b. melaksanakan penerbitan Kalender Pemprov;
- c. melaksanakan penerbitan Tabloid Pemerintah;
- d. melaksanakan kegiatan dukungan dan keikutsertaan dalam PRSU;
- e. melaksanakan kegiatan dukungan dan keikutsertaan dalam berbagai pameran;
- f. melaksanakan kegiatan publikasi melalui media luar ruang (baliho, spanduk, banner, billboard);
- g. melaksanakan kegiatan publikasi melalui ruang dalam (indoor);
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

E.1.3. Kepala Seksi Penyiaran

Kepala Seksi Penyiaran mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan diseminasi informasi melalui sarana radio, televisi dan surat kabar yang ada di Sumatera Utara;
- b. melaksanakan dialog interaktif di televisi siaran;
- c. melaksanakan dialog interaktif di radio siaran;
- d. melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi yang akan menjadi narasumber dan moderator pada kegiatan dialog interaktif;
- e. melaksanakan jumpa pers;
- f. melakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran;
- g. melaksanakan ekspos kegiatan APBD Provsu;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- k. melaksanakan pemberian laporan dan saran kepada atasan langsung menyangkut kegiatan.

F. Bidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa

Bidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan serta melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan informasi pos, telekomunikasi informasi dan media massa.

F.1. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa

Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan penyusunan program kerja tahunan dan lima tahunan bidang pos, telekomunikasi, informasi dan media massa;
- b. penyelenggaraan perencanaan operasional kegiatan program kerja bidang pelayanan postel, teknologi dan informatika yang berpedoman kepada Rencana Kerja Dinas;
- c. penyelenggaraan pembagian tugas bidang pelayanan postel, teknologi dan informatika kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. penyelenggaraan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
- f. penyelenggaraan pengkoordinasian, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di bidang pelayanan postel, teknologi dan informatika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan;
- g. penyelenggaraan penerimaan atas jasa-jasa di bidang telekomunikasi, perizinan dari jasa titipan/travel dan pelaksanaan manajemen informatika, pemeliharaan jaringanj dan fasilitas multi media;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai standar yang ditetapkan.

F.1.1. Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi

Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas dimaksud dibantu oleh Seksi Pos dan Telekomunikasi, Seksi Analisis Data dan Informasi dan Seksi Bina Pemberdayaan Media Massa.

Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana, evaluasi dan petunjuk teknis kegiatan pada seksi pos dan telekomunikasi;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin jasa titipan untuk kantor cabang;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi (*cable duct*) lintas kabupaten kota atau jalan provinsi;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, kawat atau *fiber optic* (FO), untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk penertiban jasa titipan untuk kantor cabang;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan dalam bentuk sertifikat dan label yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel untuk alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pengawasan layanan jasa telekomunikasi;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi;

- j. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi;
- k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa;
- o. Melaksanakan laporan dan saran kepada atasan menyangkut kegiatan.

F.1.2. Kepala Seksi Analisa Data dan Informasi

Kepala Seksi Analisa Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana, evaluasi dan petunjuk teknis kegiatan pada seksi Analisa Data dan Informasi;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemetaan jaringan telekomunikasi;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemetaan pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk koordinasi pemberian izin pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pengawasan pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk koordinasi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dan pengawasan dalam rangka pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dan Universal Service Obligation (USO) di bidang telekomunikasi;

- g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung;
- k. Melaksanakan pelaporan dan saran kepada atasan langsung menyangkut kegiatan.

F.1.3. Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Media Massa

Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Media Massa mempunyai, uraian tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolah data untuk penyusunan rencana, evaluasi dan petunjuk teknis kegiatan pada Seksi Bina Pemberdayaan Media Massa Postel;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan media massa penyiaran;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan media massa televisi
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end), TV Cable cakupan provinsi.
- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bidang Pos, Telekomunikasi dan Media Massa Penyiaran;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk koordinasi dan konsultasi dengan asosiasi dan masyarakat pos, telekomunikasi dan media massa penyiaran;

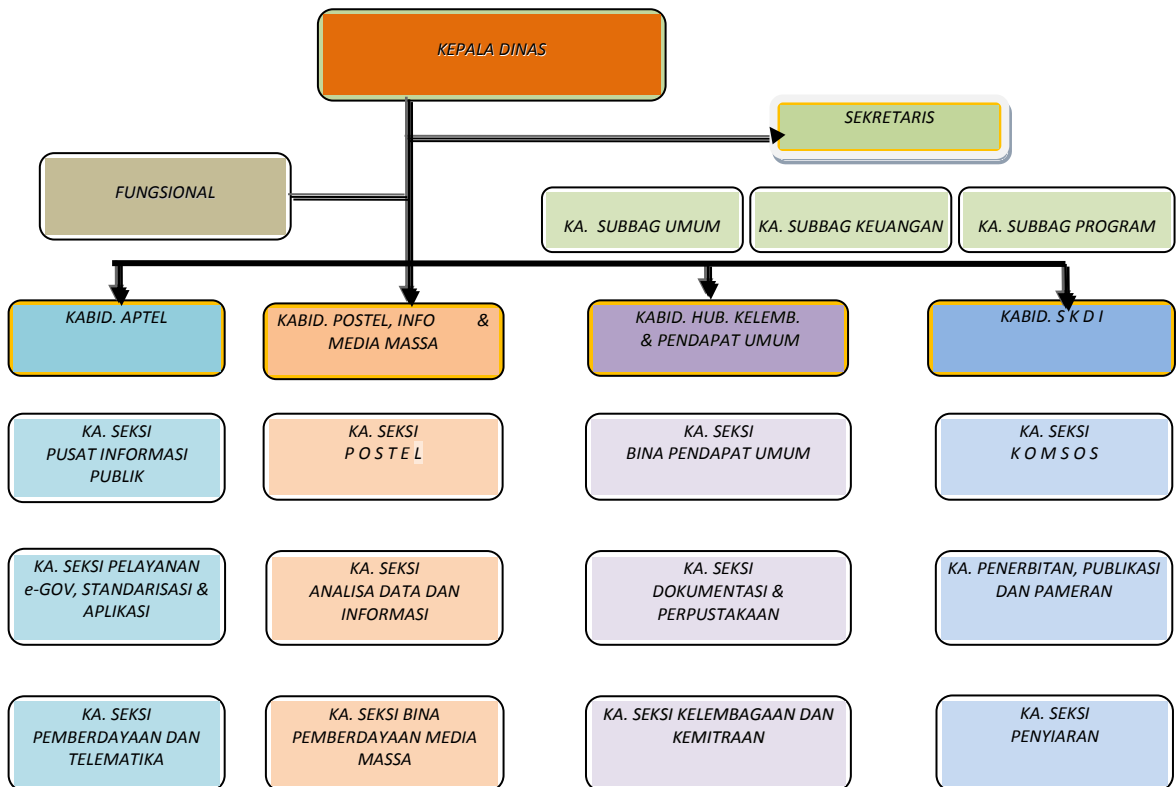
- g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk pelayanan informasi pos, informasi telekomunikasi melalui media massa;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung
- k. Melaksanakan pelaporan dan saran kepada atasan langsung menyangkut kegiatan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dapat membentuk kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tugas, fungsi dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.1.3 Struktur Organisasi SKPD

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya SKPD

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian sebagai "kekuatan" Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2013, jumlah pegawai sebanyak 153 orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

a. Berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	
	Eselon II-a (Kepala Dinas_	1
	Eselon III-a (Kepala Bidang/Sekretaris)	5
	Eselon IV-a (Kepala Sub.bag/Subbid/Seksi)	15
	Jumlah	21
2	Jabatan Fungsional	
	Pranata Humas	8
	Pustakawan	1
	Arsiparis	1
	Pranata Komputer	1
	Jumlah	11
3	Fungsional Umum	121

b. Berdasarkan pangkat dan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e	-
2	IV-d	-
3	IV-c	1
4	IV-b	2
5	IV-a	8
6	III-d	34
7	III-c	14
8	III-b	56
9	III-a	13
10	II-d	3
11	II-c	8
12	II-b	10
13	II-a	3
14	I-d	1
15	I-c	-
16	I-b	-
17	I-a	-

c. Berdasarkan jenjang pendidikan

No	PENDIDIKAN	JURUSAN	JLH
1	S2	- Magister Administrasi Publik	4
		- Magister Ilmu Hukum	1
		- Magister Ilmu Komunikasi	3
		- Magister Komunikasi Islam	2
		- Magister Manajemen	2
		- Magister Pendidikan Agama	1
		JUMLAH	13
2	S1	- Administrasi Publik	1
		- Bahasa dan Sastra Indonesia	3

		- Bahasa dan Sastra Inggris	6
		- Dakwah	1
		- Ekonomi Manajemen	9
		- Ekonomi Akuntansi	2
		- Ekonomi Pembangunan	2
		- Hukum Internasional	2
		- Hukum Keperdataan	3
		- Ilmu Jurnalistik	7
		- Sosial Komunikasi	7
		- Ilmu Pemerintahan	2
		- Informatika Komputer	1
		- Pendidikan Agama Islam	1
		- Pendidikan Sejarah	1
		- Penerangan dan Penyiaran Agama	2
		- Pertanian	3
		- Budidaya Perairan	1
		- Teknik Industri	1
		- Teknik Mesin	1
		- Teknik Informatika	5
		- Teknik Sipil	2
		JUMLAH	64
3	Sarmud (D3)	- Ekonomi Internasional	1
		- Ekonomi Manajemen	1
		- Ekonomi Akuntansi	1
		- Bahasa dan Sastra Inggris	1
		- Manajemen Informatika	2
		- Ilmu Sosiastri	1
		- Matematika	1
		- Komputerisasi Akuntansi	1
		- Teknik Komputer	1
		JUMLAH	10
4	D1	Ahli Multi Media	1
5	SLTA	-	57
6	SLTP	-	5
7	SD	-	3

d. Berdasarkan gender (jenis kelamin)

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1	IV-e	-	-
2	IV-d	-	-
3	IV-c	1	-
4	IV-b	1	1
5	IV-a	2	6
6	III-d	18	16
7	III-c	10	4
8	III-b	34	22
9	III-a	7	6
10	II-d	1	2
11	II-c	7	1
12	II-b	9	1
13	II-a	3	-
14	I-d	1	-
15	I-c	-	-
16	I-b	-	-
17	I-a	-	-

Sumber data: Sub Bagian Umum Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2013

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bidang komunikasi dan informatika dengan sebaik mungkin melalui pelayanan prima. Tidak mengherankan dalam kurun waktu 5 tahun, sejak 2008 sampai 2013, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mendapatkan berbagai penghargaan atas keberhasilannya, terutama dari Pemerintah pusat.

Untuk lebih rinci penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera utara dapat diuraikan sebagai berikut:

B.1. Keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2008

NO	HASIL-HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
1	Juara II Festival Pagelaran Pertunjukan Rakyat di Sumatera Utara	Tim pertunjukan Rakyat menerima penghargaan Juara II Tingkat Nasional di Padang
2	Terbentuknya Media Center di Dinas Kominfo Provsu	Untuk memberikan informasi kepada masyarakat (internet gratis)
3	Penyusunan Pidato Gubsu setiap awal pekan kepada seluruh jajaran SKPD guna meningkatkan wawasan, motivasi dan pengetahuan pegawai	Terpusatnya pidato Gubsu melalui satu instansi yang berwenang.

B.2. Keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2009

Pada tahun 2009 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara telah membuat website milik pemerintah daerah, yakni www.sumutprov.go.id. Pembuatan website ini bertujuan agar masyarakat dengan mudah mengakses informasi terkait program, sasaran, kebijakan Pemerintah Sumatera Utara.

Keberhasilan yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2009 adalah :

NO	HASIL-HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
1	Juara 1 Nasional Eksibisi Pertunjukan Rakyat di Malang	Pemprovsu berhasil meraih Juara 1 tingkat Nasional Lomba Pertunjukan Rakyat
2	Penetapan Open Software di lingkungan Pemprovsu	Pemprovsu memiliki open software yang dapat diintegrasikan antar SKPD di Lingkungan Pemprovsu
3	Ranperda pertama di Indonesia tentang Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Sumatera Utara dalam penggalian PAD dan Penataan Tata Ruang	Sumatera Utara memiliki Ranperda tentang Peraturan Menara Telekomunikasi Bersama
4	Penerapan Video Conference di lingkungan sekretariat dalam rangka komunikasi pengawasan pimpinan	Dalam rangka mempercepat, mengefisienkan dan mempermudah arus komunikasi antara pimpinan di jajaran Pemprovsu menerapkan video conference.
5	Penamaan e-mail di semua SKPD laporan mingguan / bulanan tentang pelaksanaan proyek melalui e-mail	Dalam rangka mempermudah dan mempercepat akses informasi dan laporan setiap SKPD telah memiliki e-mail.

B.3. Keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2010

Pada tahun 2010 keberhasilan yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah:

NO	HASIL-HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
1	Juara II Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional di Pekan Baru 26 Mei	Pemprovsu berhasil meraih Juara II tingkat Nasional Lomba Pertunjukan Rakyat

	2010	
2	Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 10 Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 10 Kab/Kota

B.4. Keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2011

Pada tahun 2011 keberhasilan yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah:

NO	HASIL-HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
1	USO Award	Pemberian penghargaan untuk proposal terbaik I di Indonesia dengan judul "KLINIK P / M-PLIK"
2	Juara Harapan I Pagelaran pertunjukan Rakyat tingkat Nasional di Solo	Pemprovsu berhasil meraih Juara Harapan I tingkat Nasional Lomba Pertunjukan Rakyat
3	Tersosialisasinya kinerja Tiga Tahun Pemerintahan Gubsu dan Wagubsu kepada Masyarakat	Tahun 2012 akan dilaksanakan kembali sosialisasi 4 tahun pemerintah gubsu dan wagubsu kepada masyarakat
4	Adanya Standard Operating Procedure bidang Perizinan bidang Pos dan Telekomunikasi	Sudah ada operating procedure dan standar pelayanan minimal
5	Terbangunnya jaringan layanan intranet (VPN-IP) di 45 SKPD	Memfasilitasi jaringan langsung antar SKPD dilingkungan Pemprov

B.5. Keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2012

Pada tahun 2012 keberhasilan yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

NO	HASIL-HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
1	Lomba Karya Fotografi Layanan KPU USO 2012	Diserahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bidang Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan

		Informatika (BP3TI)
2	Badan Publik Terbaik Tingkat Provinsi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi Sumatera Utara Meraih Penghargaan Sebagai Badan Publik Terbaik Tiga Atas Keberhasilannya Sebagai Badan Publik Terbaik Tingkat Provinsi dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik .
3	Terbentuknya Komisi Informasi Sumatera Utara periode 2012 s/d 2016	Komisi Informasi sebagai lembaga Negara independen bertujuan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi di Sumatera Utara.
4	Master Plant e-Goverment	Sumatera Utara memiliki Master <i>Plant e-Government</i> sebagai pedoman acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi di pemerintahan untuk merespon tuntutan reformasi birokrasi.
5	Juara Terbaik III Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional di Manado	Tim Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara pada Lomba Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional di Manado tahun 2012 meraih Juara Terbaik III

Secara khusus, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tabel 1
Pengukuran Kinerja 2012 berdasarkan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terbukanya jaringan informasi dan forum komunikasi media tradisional di 33 kab/kota se-Sumatera Utara	a. Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah terakses informasi	4 kali, 4 kab/kota	4 kali, 4 kab/kota	100 %
		b. Jumlah Kab/Kota di Provsu yang masih dalam kategori blank spot informasi	1 kali, 33 kab/kota	1 kali, 33 kab/kota	100 %
		a. Persentase ketersediaan sarana dan			

		prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara			100 %
		- Jumlah ketersediaan dan prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara	1 kali	1 kali	
		b. Frekuensi lomba, pementasan, pagelaran, pameran dan diseminasi informasi di kab/kota	5 kali	5 kali	100 %
		c. Frekuensi dialog interaktif di radio dan televisi	36 kali	44 kali	122,2 %
		d. Frekuensi pelaksanaan Harmoni Iman di TVRI	144 kali	140 kali	97,2 %
2	Terwujudnya kerjasama dengan Asosiasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) untuk membuka Blank Spot penyebaran Surat Kabar Lokal di wilayah non komersil	a. Jumlah kerjasama yang terbentuk dengan kelembagaan Kominfo; Asosiasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar Lokal : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) dalam penyebaran informasi.	1 kali, 80 peserta	1 kali, 50 peserta	100 %
		b. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat koordinasi dengan Infokom/Humas Pemprov	19 kali	19 kali	100 %
		c. Frekuensi Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov.	1 kali	1 kali	100 %
3	Terwujudnya kerjasama dengan Mitra kerja Pos dan Telekomunikasi (Postel)	a. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan mitra kerja Postel (asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya)	25 kali	25 kali	100 %
		b. Jumlah Kab/Kota yang sudah terlayani Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)	33 kab/kota	33 kab/kota	100 %

Dari tabel pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012 secara umum dikatakan tercapai sesuai target RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang realisasi capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan, seperti pada Frekuensi dialog interaktif di radio dan televisi, Frekwensi pelaksanaan pertemuan/rapat koordinasi dengan Infokom/Humas Pemprov.

Di sisi lain, pencapaian indikator kinerja juga ditentukan oleh sejauhmana program atau kegiatan-kegiatan strategis itu dilaksanakan secara tepat, terarah dan berdaya guna. Berikut akan dipaparkan pengukuran kinerja berdasarkan program dan kegiatan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012.

Tabel 2
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Program/Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
	Kegiatan :			
	1. Sosialisasi tentang Pemberdayaan KIM di Kab/kota	1 kali, 33 kab/kota	1 kali, 33 kab/kota	100 %
	2. Pekan Raya Sumatera Utara	1 kali	1 kali	100 %
	3. Lomba Kelompok Informasi se Sumatera Utara	1 kali, 33 kab/kota	1 kali, 33 kab/kota	100 %
	4. Pameran Filateli	1 kali	Direvisi	-
	5. Lomba Pementasan Tradisional di Kab/kota	1 kali di 25 Kab/kota	1 kali di 25 Kab/kota	100 %
	6. Dialog Interaktif di Televisi	18 kali	22 kali	122 %
	7. Dialog Interaktif di Radio	18 kali	22 kali	122 %
	8. Tabolid Sumut Membangun	12 edisi	direvisi	-
	9. Harmoni Iman Islam di TVRI	48 kali	47 kali	97,9%
	10. Harmoni Iman Kristen, Protestan /Katolik di TVRI	48 kali	46 kali	95,8%
	11. Harmoni Iman Budha/Hindu di TVRI	48 kali	47 kali	97,9%
12. Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab/Kota	2 kali	2 kali	100 %	
2	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga			
	Kegiatan:			
	1. Workshop Pendidikan Pemerintahan bagi Wartawan	1 kali, 80 peserta	1 kali, 50 peserta	100 %
	2. Peningkatan <i>Capacity Building</i> untuk peningkatan Juru Foto dan Juru Kamera di lingkungan Humas dalam rangka penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 kali, 34 peserta	1 kali, 34 peserta	100 %
	3. Pertemuan Infokom / Humas Pemprov	1 kali	1 kali	100 %
	4. Jumpa Pers	24 kali	28 kali	116,7%
	5. Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov	1 kali, 50 peserta	1 kali, 50 peserta	100 %
	6. Temu Konsultasi Bakohumas	2 kali	2 kali	100 %
	7. Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi melalui Media Informasi	12 kali	12 kali	100 %
	3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi		
Kegiatan :				
1. Rapat Evaluasi Rutin Pos dan Telekomunikasi		12 kali	12 kali	100 %
2. Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Media Massa Postel, Asosiasi, Provider dan Organisasi Radio Lainnya		12 kali	12 kali	100 %
3. Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota		1 kali	1 kali	100 %
4. Operasional M-PLIK ke 33 kab/Kota	33 kab/kota	33 kab/kota	100 %	

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target kinerja yang dipertanggungjawabkan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 secara

umum dapat dikategorikan terlaksana dengan baik, walaupun tingkat pencapaiannya bervariasi (beragam).

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada TA. 2012 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Tabel VI.C.2 dan Tabel T-IV.C.3.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sebagaimana dijelaskan di awal, pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara secara umum dikatakan sudah memenuhi harapan masyarakat. Namun, seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Hal ini tentunya berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin canggih. Kemajuan tersebut seyogianya harus mampu direspon oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Namun, berbagai permasalahan dan kendala kerap dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyelaraskan kemampuan / kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kemampuan itu tentunya harus berorientasi pada pelayanan informasi yang memuaskan dengan terus berupaya merespon keinginan dan harapan publik dengan menghadirkan program dan kegiatan yang relevan, efektif dan adaptif. Hal ini bertujuan agar tuntutan masyarakat mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, murah dan akuntabel dengan memperhatikan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD, di antaranya :

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah di Sumatera Utara yang mengarah kepada “daya saing”.

- b. Pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor belum maksimal, baik dalam lingkup SKPD, Kabupaten / Kota maupun masyarakat, khususnya dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- c. Pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan dan pengembangan TIK masih rendah, khususnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.
- d. Sikap proaktif masyarakat terhadap pengembangan dan pemberdayaan TIK belum optimal.

Selain tantangan yang ada, terdapat juga peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengembangan pelayanan informasi, seperti :

- a. Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusat Data (*data center*) dalam pengelolaan teknologi informasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui *Network Operating Center* (NOC) dan sekaligus diharapkan sebagai konsultan perencanaan bidang komunikasi dan informatika bagi Pemerintah Kabupaten / Kota;
- b. Memanfaatkan jaringan komunikasi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai modal utama dalam percepatan arus pertukaran dan diseminasi informasi antar SKPD, Pemerintah Kabupaten / Kota, seperti: *Local Area Network* (LAN), *Wide Area Network* (WAN), Akses Internet dan Intranet;
- c. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan TIK melalui program Universal Service Obligation (USO);
- d. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan TIK mulai berkembang yang diharapkan dapat mendongkrak “daya saing” perekonomian Sumatera Utara;
- e. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.

Di balik tantangan yang ada, terdapat juga peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pengembangan pelayanan dasar (minimal), sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Permenkominfo RI) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota memberikan harapan baru dalam peningkatan pelayanan informasi publik.

Upaya merealisasikan harapan dan peluang tersebut tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan. Dibutuhkan kemampuan SDM yang handal dan kompeten di bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung sangat dibutuhkan, antara lain gedung / kantor yang representatif, peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk menunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dan internet.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten Sistem Aplikasi SKPD dalam satu *Network Operating Center (NOC)* guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat serta stakeholder untuk mengakses data dan informasi dari pusat data di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melalui komputer secara intranet maupun internet di ruangan masing-masing baik untuk mencari informasi maupun menyebarkan informasi yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan semua pihak, khususnya aparatur menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur di segala bidang.

Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Utara merencanakan optimalisasi pembangunan, pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemberdayaan masyarakat tetap menjaga dan mempertimbangkan dari aspek prioritas pembangunan daerah, menyeluruh, merata, seimbang dan tetap menjaga kondusivitas keberagaman Sumatera Utara.

Upaya tersebut dilaksanakan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima yang dicapai melalui program dan kegiatan yang relevan berdasarkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara periode

2014-2018, sebagaimana diuraikan dalam lampiran Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Adapun kondisi yang diinginkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 adalah :

1. Menjadikan *local government* (pemerintah Provinsi Sumatera Utara) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat database daerah dimana semua lembaga / institusi baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu *Network Operating Center (NOC)*;
2. Adanya pengembangan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga percepatan budaya informasi dapat berjalan signifikan;
3. Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi IT bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Utara, swasta, dan masyarakat serta komunitas T di Provinsi Sumatera Utara;
4. Adanya pembinaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana telematika pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
5. Adanya penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi secara berkesinambungan;
6. Pengembangan infrastruktur telematika sampai tingkat kabupaten/kota sehingga penjaringan data dapat dilakukan secara online dalam waktu relatif cepat dan efisien;
7. Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan media massa dalam rangka meningkatkan potensi daerah;
8. Adanya pengembangan informasi dan komunikasi melalui kemitraan media massa;
9. Adanya pembinaan dan pengembangan Media Tradisional di seluruh kab/kota se-Sumatera Utara secara berkesinambungan untuk memantapkan diseminasi informasi kepada masyarakat;
10. Adanya pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai lumbung informasi bagi Pemerintah Provinsi di Kabupaten / Kota berbasis IT;
11. Pengembangan konten website Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Aplikasi Sistem Informasi SKPD, baik internet maupun intranet;
12. Pengembangan implemementasi e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

13. Adanya regulasi berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang memberi kepastian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informatika dan di dalamnya terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti mengenai tata cara infrastruktur dibangun, prosedur aplikasi dibangun untuk kemudian digunakan sebagai pengelolaan data online, termasuk juga perencanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di Sumatera Utara;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat mampu melahirkan suatu revolusi teknologi baru. Dianggap sebagai suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi serba-guna (*general purpose technology*) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Teknologi informasi merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global.

Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi.

Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global. Informasi mampu berada di garda depan dalam pertempuran kompetisi, mendahului aset-aset yang lain.

Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan darimana informasi tersebut dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi

informasi, pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk. Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam pemerintahan. Kegiatan komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat.

Keterhubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknis saja, yang terbentuk dari elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang dikomunikasikan, tetapi lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku. Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai prasyarat untuk memenangkan persaingan global.

Dalam memenangkan persaingan yang makin mengglobal, pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai pengetahuan (*knowledge*) secara tepat, akan mampu mendukung perwujudan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan informatika yang ditopang oleh kemampuan menghasilkan dan menggunakan produk lokal yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Dalam konteks itu, pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi perlu diperhatikan dalam mendukung promosi serta pemasaran yang tepat, sehingga menghasilkan ekonomi yang berdaya saing sebagai keunggulan ekonomi lokal dalam memasuki pasar dunia. Berbagai potensi keunggulan lokal seperti : keindahan alam, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, dan penduduk Sumatera Utara yang beragam etnik, budaya,

agama dan bahasa, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Hal ini selaras dengan hasil riset World Bank yang mengungkapkan bahwa, “ setiap 10 % pertumbuhan ekonomi industry komunikasi, masyarakat akan meningkat pertumbuhannya sebesar 1,3 %” (sumber <http://go.worldbank.org/natlock7hvo>).

Untuk itu, keunggulan khas daerah Sumatera Utara perlu digali dan dikembangkan menjadi semacam *Information Database*, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor-sektor yang lain dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Dalam kaitan ini, informasi menjadi salah satu pilar atau modal dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengetahuan masyarakat dari berbagai sektor tersebut bila dikembangkan secara sistematis dan terus-menerus dapat menghasilkan suatu *backbone* ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan modal dasar bagi pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, atau dikenal sebagai *Knowledge Base Society*. Seluruh capaian/produk budaya masyarakat baik yang berupa produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk pengembangan budaya tradisional dan keunggulan lokal, produk-produk hasil pengembangan sumber daya alam merupakan suatu bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan.

Untuk mendorong masyarakat Sumatera Utara menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan tersebut dapat mensejajarkan Provinsi Sumatera Utara menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang telah maju, dengan kapabilitas nasional untuk secara setara saling bertukar ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Pentingnya informasi bagi setiap warga masyarakat telah dipahami oleh negara sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Dalam konteks itu, maka infrastruktur komunikasi dan informatika mutlak harus dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan. Di masa depan, informasi tidak lagi menjadi domain Pemerintahan Daerah, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat.

Pemberian hak untuk ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari anggota masyarakat suatu negara yang berdaulat. Sehingga dapat tercipta suatu iklim distribusi informasi yang sehat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing yang tinggi.

Untuk itu diperlukan keterpaduan serta dukungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyiapan serta pengelolaan data dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini seiring dengan derasnya tuntutan publik terhadap pemerintah akan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam pemberian informasi bagi masyarakat.

Dalam konteks itu, permasalahan urgen yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi pelayanan bidang komunikasi dan informatika di Sumatera Utara di antaranya :

a. Kesenjangan Digital Tinggi

Secara geografis, Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, memiliki total wilayah seluas 181.860.65 km², terdiri dari daratan seluas 71.680,68 km² atau 3,73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan perairan seluas 110.000,65 km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian Barat maupun bagian Timur Pulau Sumatera.

Wilayah Provinsi Sumatera Utara berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten dan 8 Kota, 417 Kecamatan dan 5744 Desa/Kelurahan dengan

jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 13.215.401 orang dan pertumbuhan rata-rata 2000-2010 sebesar 1,22 % (data BPS tahun 2012).

Salah satu persoalan serius yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah perbatasan adalah kesenjangan informasi yang masuk ke daerah perbatasan. Masyarakat di daerah perbatasan begitu mudahnya mengakses berbagai jenis siaran dari negara-negara tetangga, sementara radio dan televisi siaran nasional maupun daerah kadang tidak dapat diterima dengan baik di kabupaten-kabupaten terpencil di wilayah perbatasan.

Keterbatasan daya jangkau siaran nasional dan peluberan siaran dari luar negeri ini jika tidak ditangani dengan baik akan semakin menciptakan kesenjangan informasi yang berimplikasi pada melemahnya semangat nasionalisme masyarakat daerah perbatasan. Kesenjangan informasi itu dapat diamati melalui :

- 1) Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali ;
- 2) Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.

Dalam konteks tersebut, upaya pemerataan infrastruktur, akses, dan kemudahan penggunaan media perlu diakselerasikan dengan penyediaan konten yang edukatif bagi pengembangan kawasan perbatasan. Untuk itu diharapkan kepada penyedia konten yang bermitra dengan pemerintah agar pro-aktif menyediakan dan membuka akses terhadap konten-konten positif bagi pengembangan kawasan perbatasan darat maupun laut Indonesia.

b. Infrastruktur Akses Informasi masih Lemah

Menurut *International Telecommunication Union* (ITU) pembangunan TIK berindikasi tidak hanya kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi), tetapi juga dipengaruhi juga seberapa prosentase upaya peningkatan sarana dan prasarana TIK serta seberapa besar tingkat kepedulian dan melek terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atas sumber daya manusianya.

Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan kualitas dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur TIK yang makin meningkat dan terjangkau oleh masyarakat selaku pengguna TIK. Dengan upaya tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas SDM dalam memanfaatkan jasa akses telekomunikasi dan TIK yang secara ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Secara umum ketersediaan infrastruktur jaringan akses informasi di Provinsi Sumatera Utara masih lemah, yakni terbatas pada jaringan antar SKPD, seperti Jaringan LAN dan akses internet yang meliputi Dinas Kominfo Provsu, gedung kantor Gubsu, Bappeda Sumut, BKD dan Satpol PP. Sedangkan Wi-fi hanya ada di lantai 6, 8, 9 dan 10 Kantor Gubernur Sumatera Utara. Walaupun demikian, jaringan intranet sudah dapat terkoneksi ke seluruh SKPD dengan menggunakan koneksi VPN (*Virtual Private Network*). Namun permasalahan yang dihadapi adalah pemanfaatan jaringan intranet belum optimal dalam mendukung kelancaran arus informasi setiap SKPD yang disebabkan rendahnya dukungan dana APBD Provinsi Sumatera Utara.

Pada lingkup kabupaten / Kota infrastruktur jaringan telekomunikasi yang tersedia sebanyak 3267 telepon pedesaan, 337 PLIK (Pusat Layanan Informasi Kecamatan), 96 MPLIK (Mobil Pusat Layanan Informasi Kecamatan) dan 33 Wi-fi . Namun demikian, akses informasi antar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 33 kabupaten Kota dan 417 Kecamatan yang ada di Sumatera Utara belum terkoneksi dalam satu aplikasi sistem informasi. Padahal ini sangat penting, dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Utara.

Dalam konteks ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika (TVRI-RRI) untuk mengatasi blankspot informasi dan komunikasi di Sumatera Utara juga masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari 33 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak terjangkau siaran TVRI Sumut sebanyak 18 kab/kota dan siaran RRI sebanyak 13 kab/kota yang selanjutnya berdampak pada terbatasnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat terutama di wilayah pesisir dan dataran tinggi.

Dari deskripsi (gambaran singkat) kondisi ketersediaan infrastruktur jaringan akses informasi di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan di atas dapat dikatakan belum optimal. Untuk itu, perlunya pemenuhan dan

pemanfaatan ketersediaan infrastruktur jaringan akses informasi dalam kegiatan perekonomian guna menghasilkan *real economic value* dan meningkatnya penyalahgunaan (*misuse dan abuse*) penggunaan TIK.

c. Belum adanya petunjuk pelaksanaan NSPK bidang Kominfo

Belum adanya petunjuk pelaksanaan NSPK bidang Kominfo yang jelas dan tegas tentang kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bidang Kominfo dalam bentuk peraturan daerah, sehingga menyebabkan keberadaan Dinas Kominfo menjadi tidak merata di masing-masing daerah (3 memiliki Dinas Kominfo mandiri, 30 bergabung dengan dinas lain) yang selanjutnya menyulitkan dalam melakukan koordinasi secara berjenjang dan dalam pelayanan informasi publik.

d. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur SDM Kominfo

Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK yang tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan kualitas SDM dan sarana prasarana infratraktur mengakibatkan lambatnya pelayanan informasi publik baik internal aparatur Provinsi dan kab/kota apalagi pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah personel pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 166 orang sesuai bidang kelimuan dan keahliannya tidak seimbang dengan beban kerja yang tinggi. Untuk itu, perlunya dilakukan penambahan kuantitas pegawai disertai peningkatan kualitas pegawai.

Ke depan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara diharapkan akan teratasi dengan memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan dan memiliki daya saing.
- 3) Mengembangkan infrastruktur jaringan dan sarana informasi dan komunikasi yang berkualitas.
- 4) Meningkatkan kualitas hubungan kelembagaan antara Pemerintah dengan Stakeholder.

- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui pemanfaatan ICT.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode tahun 2013-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 yang menetapkan H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si dan Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan kemudian dilantik secara resmi pada tanggal 17 Juni 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka visi, misi, tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa arah kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan RPJMD Tahap III, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, merupakan bagian tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018, sebagai berikut:

3.2.1 Visi

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

3.2.2 Misi

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi;
2. Membangun dan menetapkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional, dan internasional;
3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah;
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih (gubernur dan wakil gubernur) periode 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menerjemahkan kembali ke dalam visi dan misi SKPD. Visi dan misi SKPD ini berfungsi sebagai instrument dalam menunjang terwujudnya mewujudkan visi dan misi (gubernur Sumatera Utara).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa visi gubernur Sumatera Utara adalah menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan metode, strategi, dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam misi gubernur Sumatera Utara.

Dari kelima misi gubernur Sumatera Utara tersebut, dimana salah satunya menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) dapat tercapai melalui upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; melalui penerapan e-Government (*e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance*). Penerapan e-Government inilah yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk memberhasilkannya sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018.

Berangkat dari visi dan misi gubernur Sumatera Utara inilah, maka permasalahan utama yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) adalah terjadinya kesenjangan informasi, belum adanya petunjuk yang tegas terhadap pelaksanaan NSPK bidang Kominfo, pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi belum optimal dalam mendukung implementasi e-Government, lemahnya infrastruktur akses informasi, rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur SDM Kominfo Provinsi Sumatera Utara.

Adapun faktor penghambat terjadinya permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terhadap pencapaian visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah:

- a. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum mencapai titik prioritas pembangunan daerah.
- b. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
- c. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.
- d. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan budaya kerja yang dapat cepat, tepat dan akurat.

Sedangkan faktor pendorong terhadap pencapaian visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sumatera Utara yaitu :

- a. Kepercayaan Pemangku Kebijakan terhadap eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi.
- b. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informaiika yang mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategis nasional pengembangan e-Government;
 - 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah;
 - 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - 6) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggaraan Negara.
- c. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin meningkat.
- d. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.

3.3 Telaahan Renstra

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014-2018 yang lebih baik, akuntabel dan komprehensif. Diperlukan upaya menganalisis dan menyesuaikan dengan Renstra Kementerian, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan melihat faktor-faktor penghambat ataupun faktor-

faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan SKPD.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang juga menjadi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Karena memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap publik atau warga masyarakat, sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 f, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut di atas, maka Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten / Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar publik untuk memperoleh informasi.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan informasi maka Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten / Kota, khususnya SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan berbagai program, strategi, arah kebijakan dan kegiatan secara tepat, reponsif dan adaptif sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.

Namun yang menjadi permasalahan utama pemerintah dan Provinsi serta Kabupaten / Kota adalah bagaimana menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan akuntabel, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) teknologi informasi yang memadai, kemampuan atau kompetensi SDM aparatur yang handal, terampil dan memiliki komitmen untuk mengembangkan TIK kesiapan masyarakat untuk menerima perkembangan teknologi informasi yang lebih canggih, dan yang paling mendasar keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program / kegiatan yang telah direncanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk itu diperlukan komitmen Pemerintah terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sumatera Utara, khususnya menyangkut penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) teknologi informasi yang menjadi kendala utama. Selain itu, perlunya

memantapkan kembali regulasi yang berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor. Selanjutnya, bagaimana mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK yang ramah lingkungan dan daya saing tinggi;

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan akan dapat menjadi stimulus dan kekuatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan TIK menuju Sumatera Utara yang sejahtera dan berdaya saing.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan. Penataan ruang tersebut diselenggarakan dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Terkait kegiatan pengaturan dalam penyelenggaraan penataan ruang, seluruh pemerintah daerah di provinsi Sumatera Utara (Pemda Provinsi / Kab /Kota) telah merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Umumnya proses revisi Perda RTRW tersebut sudah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum RI sebelum ditetapkan menjadi Perda, bahkan dari 33 Kab /Kota sudah ada 3 Kab /Kota sudah ditetapkan menjadi Perda, yaitu RTRW Kota Medan, Perda RTRW Kab Simalungun, Perda RTRW Kota Gunung Sitoli.

Perda-perda yang disebutkan di atas diterbitkan melalui proses panjang dengan yang kental dengan pelibatan peran masyarakat dan kelembagaan yang ada seperti Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok profesional, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Sinkronisasi RTRW antar daerah otonom (antar

provinsi dan antar kabupaten / kota) juga dilakukan untuk meminimalisasi konflik penggunaan lahan di daerah.

Kegiatan pembinaan panataan ruang menjadi prioritas Pemda Provinsi Sumatera Utara pasca terbitnya Undang-undang penataan ruang yang baru (UU 26/2007) yang membuat semakin pentingnya fungsi tata ruang dalam proses pembangunan. Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang dilakukan berupa :

1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
2. Sosialisasi peraturan perundangan dan pedoman;
3. Bimbingan, sepervisi, konsultasi;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Penelitian dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat

Berkaitan dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara bidang Komunikasi dan Informatika mengambil peran struktur ruang jaringan telekomunikasi yang merupakan rencana struktur pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam bidang telekomunikasi lima tahun mendatang.

Implikasi RTRW Provinsi Sumatera Utara terhadap peningkatan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika saat ini sudah dapat dirasakan manfaatnya. Saat ini, sudah terbangun 3267 telepon pedesaan, 337 PLIK (Pusat Layanan Informasi Kecamatan), yang didukung secara mobile oleh 96 M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Informasi Kecamatan) dan 33 Wi-Fi.

Namun yang menjadi kendala adalah sulitnya mengubah *mind set* masyarakat dari budaya agraris, agro industry, industry, industry informasi sampai dengan masyarakat informasi yang merupakan budaya baru bagi masyarakat Sumatera Utara. Masyarakat informasi yang dimaksud adalah masyarakat yang memanfaatkan informasi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pemanfaatan dan pengembangan indistri telekomunikasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Sumatera Utara, maka peluang Sumatera Utara menjadi Provinsi yang memiliki daya saing semakin kuat.

Ke depan, diarahkan pengembangan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui RTRW Provinsi Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada upaya penyusunan *cell plan* dan peta penggelaran kabel telekomunikasi. Hal ini sudah menjadi bagian pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) RTRW Provinsi Sumatera Utara yang sudah disampaikan ke Kabupaten / Kota.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan 5 tahun ke depan (2014-2018), Provinsi Sumatera Utara akan terkoneksi hingga level pemerintahan daerah terendah melalui jaringan telekomunikasi yang canggih. Dengan demikian, diharapkan akan komunikasi akan berjalan lancar dan dinamis, sehingga tidak ada lagi *inkoneksitas* atau *gap information* (kesenjangan informasi) antara Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga ke tingkat Desa dan Dusun.

Tabel T-IV.C.15
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

1	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Menyusun <i>cell plan</i> dan peta penggelaran kabel telekomunikasi dalam rangka menghubungkan jaringan komunikasi ke Kab /Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah di Kab /Kota, stakeholder dan mitra kerja Dinas Komunikasi - Rendahnya dukungan masyarakat, akibat mind set yang berorientasi pada bidang agro daripada bidang IT - Rendahnya dukungan dana untuk melaksanakan program/ kegiatan tersebut - Tidak adanya atau kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat tentang pentingnya IT dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. - Kurangnya sarana dan prasarana (infrastruktur) IT 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem birokrasi yang belum maksimal dalam pelayanan - Rendahnya pemahaman para Pimpinan Daerah di Kab/ Kota - Rendahnya pendidikan masyarakat - Rendahnya kemauan para stake holder dan mitra kerja dinas komunikasi dan informatika 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola perizinan yang tepusat - Kewenangan Dinas Kominfo sebagai SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika - Adanya amanat Permenkominfo/22/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kominfo - SDM Dinas Kominfo yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di berbagai bidang. - Tuntutan masyarakat akan informasi yang cepat, mudah, murah dan akuntabel.

3.4. 2 Telaahan Rencana Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi dan keanekaragaman hayati.

Sejalan dengan itu, Dinas Kominfo Provsu sebagai salah satu SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika di Sumatera Utara belum melakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Dalam kaitan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menentukan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yaitu :

1. Gambaran pelayanan SKPD

Secara umum pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, khususnya pelayanan bidang komunikasi dan informatika di Sumatera Utara sudah baik. Hal ini berdasarkan hasil capaian kinerja layanan selama kurun waktu 2009-2013 yang termuat dalam LAKIP Dinas Kominfo Provsu.

Namun ada beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis yaitu :

- a. Rendahnya kualitas SDM Aparatur pemerintah pada Dinas Kominfo Provsu bidang TIK;
- b. Pembangunan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum mencapai titik prioritas pembangunan daerah.
- c. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas.
- d. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal.
- e. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan menuju perubahan budaya kerja yang dapat cepat, tepat dan akurat.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian

Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan sasaran jangka menengah dan renstra Kementerian adalah bagaimana memaksimal dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur jaringan akses informasi di Sumatera Utara untuk membuka blankspoot siaran, khususnya siaran TVRI Sumatera Utara dan RRI Medan.

3. Sasaran jangka menengah dan renstra SKPD

Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan sasaran jangka menengah dan renstra SKPD adalah komitmen Pemerintah terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di

Sumatera Utara, khususnya menyangkut penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) teknologi informasi yang menjadi kendala utama. Selain itu, perlunya memantapkan kembali regulasi yang berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor. Selanjutnya, bagaimana mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK yang ramah lingkungan dan daya saing tinggi;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD

Implikasi RTRW Provinsi Sumatera Utara terhadap peningkatan pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara saat ini sudah dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini dengan terbangunnya jaringan komunikasi secara merata. Saat ini, hampir seluruh Kabupaten /Kota di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara sudah terbangun 3267 telepon pedesaan, 337 PLIK (Pusat Layanan Informasi Kecamatan), 96 MPLIK (Mobil Pusat Layanan Informasi Kecamatan) dan 33 Wifi.

Seiring dengan itu, ada beberapa hal yang menjadi isu-isu strategis terkait implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, yaitu penyusunan *cell plan* dan peta penggelaran kabel telekomunikasi yang bertujuan untuk mengatasi *inkoneksitas* atau *gap information* (kesenjangan informasi) antara Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Kelurahan hingga ke tingkat Desa dan Dusun.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Untuk saat ini belum ada analisis isu-isu strategis tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada aspek komunikasi dan informatika di Sumatera Utara. Sehingga implikasi atau dampak KLHS belum diketahui dengan pasti. Ke depan akan dilakukan upaya-upaya analisis terhadap dokumen KLHS Provinsi Sumatera Utara untuk melihat sejauhmana isu-isu krusial yang berkembang terkait fungsi pelayanan SKPD, khususnya bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu "Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera".

Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara disamping harus berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga pada tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2011 tentang tugas, fungsi dan uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kurun waktu 2014 – 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara harus mampu mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018 khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui upaya menjadikan masyarakat informasi yang berdaya saing. Salah satu ciri masyarakat berdaya saing adalah semakin tingginya kebutuhan terhadap informasi dalam berbagai bidang. Selanjutnya mampu bersaing dalam memanfaatkan informasi guna meningkatkan perubahan sosial dan pembangunan ekonomi.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi, yaitu :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INFORMASI YANG BERDAYA SAING
DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI”**

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah :

- 1) **Terwujudnya**, bermakna upaya menjadikan pembangunan ke arah yang lebih baik;

- 2) **Masyarakat informasi**, bermakna masyarakat yang menjadikan teknologi informasi sebagai “kekuatan” dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Sumatera Utara;
- 3) **Berdaya saing**, bermakna suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) **Pemanfaatan**, bermakna suatu proses memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan akselerasi pembangunan Sumatera Utara:
- 5) **Pengembangan**, bermakna proses, cara, perbuatan mengembangkan teknologi informasi secara bertahap dan teratur ke arah pembangunan yang dikehendaki;
- 6) **Teknologi informasi** (*Information technology*), bermakna seperangkat alat (teknologi) yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.2. Misi

Untuk pencapaian Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, sampai dengan tahun 2018 yang akan datang, telah menetapkan misi :

- a. Meningkatkan fasilitas dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme.
- b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga media massa, stakeholder bidang komunikasi dan informatika serta masyarakat dalam memperlancar arus informasi yang cepat, tepat dan akuntabel.
- c. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan informasi multimedia yang terprogram, mudah dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

- d. Memanfaatkan dan mengembangkan sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses informasi guna mewujudkan informasi yang transparan dan akuntabel.
- e. Membina dan mengoptimalisasikan kerjasama dengan mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam meningkatkan pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Meningkatkan fasilitas dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat informasi Sumatera Utara yang berdaya saing, harus didukung pembinaan aparatur pemerintah yang profesional, memiliki integritas, kompetensi tinggi, yang difokuskan pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.
2. **Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga media massa, stakeholder bidang komunikasi dan informatika serta masyarakat dalam memperlancar arus informasi yang cepat, tepat dan akuntabel**, bermakna bahwa untuk menunjang terwujudnya masyarakat informasi, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pemantapan kerjasama dan pemerintah, lembaga media massa, stakeholder bidang kominfo guna memperlancar arus informasi yang cepat, tepat dan akuntabel.
3. **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan informasi multimedia yang terprogram, mudah dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*) di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka memberikan pelayanan multimedia yang berkualitas

4. **Memanfaatkan dan mengembangkan sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses informasi guna mewujudkan informasi yang transparan dan akuntabel**, bermakna bahwa dalam upaya mempercepat desiminasi informasi menyangkut strategi, kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tepat guna, transparan dan akuntabel, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada upaya pengembangan sarana desiminasi informasi melalui pemanfaatan media komunikasi, baik media penyiaran, media cetak, media outdoor dan media tradisional.

5. **Membina dan mengoptimisasikan kerjasama dengan mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam meningkatkan pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah**, bermakna bahwa upaya mengoptimalkan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah, maka arah pembangunan ke depan difokuskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan mitra kerja bidang pos dan telekomunikasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Berdasarkan hal itu, Dinas Komunikasi dan informatika menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu, tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme, agar rakyat memiliki tempat bertanya.
- b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum, agar rakyat memiliki tempat menyampaikan pendapat.
- c. Meningkatkan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika, agar rakyat tidak buta informasi.
- d. Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern, agar rakyat tidak bertanya sendiri dan menjawab sendiri.
- e. Adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi.

4.2.2 Sasaran

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran organisasi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi.

Berkaitan dengan hal ini, sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Terwujudnya kualitas SDM Pegawai Dinas Kominfo Provsu yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan kinerja.
- a. Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
- b. Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;

- c. Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;
- d. Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi.

Tabel 5.1

Hubungan Hierarkis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT INFORMASI YANG BERDAYA SAING DALAM PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi-I		
Meningkatkan fasilitas dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme	Menciptakan sistem administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme	Terwujudnya kualitas SDM Pegawai Dinas Kominfo Provsu yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan kinerja.
Misi-II		
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga media massa, stakeholder bidang komunikasi dan informatika serta masyarakat dalam memperlancar arus informasi yang cepat, tepat dan akuntabel	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum	Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;
Misi –III		
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan informasi multimedia yang terprogram, mudah dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean governance</i>)	Meningkatkan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika	Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;
Misi-IV		
Memanfaatkan dan mengembangkan sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses informasi guna mewujudkan informasi yang transparan dan akuntabel,	Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern	Terwujudnya pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;

Misi-V		
Membina dan mengoptimalkan kerjasama dengan mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam meningkatkan pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah,	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi.	Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Sedangkan kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan bidang komunikasi dan informatika dalam kurun waktu 2014-2018, sebagai berikut:

Misi – Pertama : Meningkatkan fasilitas dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk Mewujudkan Misi 1 :

Strategi : Pengelolaan sistem administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan kapasitas administrasi perkantoran Dinas Kominfo Provsu;
- b. Peningkatan sarana dan prasana aparatur;

- c. Peningkatan disiplin aparatur berbasis IT;
- d. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;
- e. Peningkatan perencanaan program Dinas Kominfo Provsu;
- f. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;

Tabel 6.1

HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI – 1

VISI : Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Berdaya Saing dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi			
MISI-1 : Meningkatkan fasilitas dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Menciptakan sistem administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme	Terwujudnya kualitas SDM Pegawai Dinas Kominfo Provsu yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika dalam peningkatan kinerja.	Meningkatkan kualitas sistem administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas administrasi perkantoran Dinas Kominfo Provsu; 2. Peningkatan sarana dan prasana aparatur; 3. Peningkatan disiplin aparatur berbasis IT; 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur; 5. Peningkatan perencanaan program Dinas Kominfo Provsu; 6. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;

Misi – Kedua: Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga media massa, stakeholder bidang komunikasi dan informatika serta masyarakat dalam memperlancar arus informasi yang cepat, tepat dan akuntabel

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk Mewujudkan Misi II :

Strategi : Mendorong kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan dan pengembangan kerjasama dan kemitraan lembaga kominfo skala provinsi;
- b. Peningkatan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan program pemerintah;

- c. Peningkatan kualitas dokumentasi seluruh kegiatan Dinas Kominfo Provsu;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan;
- e. Peningkatan kualitas kerjasama dengan instansi kominfo kabupaten/kota;
- f. Peningkatan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan mitra lembaga pers dan penerbitan media;
- g. Peningkatan pemberdayaan pendapat umum;
- h. Peningkatan kualitas kerjasama dengan Bakohumas Pemerintah dan Kabupaten / Kota
- i. Peningkatan intensitas *coffee morning* dengan lembaga dan mitra lainnya;
- j. Pelatihan atau workshop kehumasan, pertemuan dan anjongsana;
- k. Pengkoordinasian seluruh Pemberitaan Pemerintah Lintas Sektor dan Instansi Vertikal yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, BAKOHUMAS serta Lembaga Kemasyarakatan, dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- l. Sosialisasi kebijakan program pemerintah;

Tabel 6.2

HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI – 2

VISI : Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Berdaya Saing dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi			
MISI-II : Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, lembaga media massa, stakeholder bidang komunikasi dan informatika serta masyarakat dalam memperlancar arus informasi yang cepat, tepat dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum	Terwujudnya kualitas kerjasama dan kemitraan antar lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat serta lembaga media massa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik;	Mendorong kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan kerjasama dan kemitraan lembaga kominfo skala provinsi; 2. Peningkatan penyelenggaraan sosialisasi kebijakan program pemerintah; 3. Peningkatan kualitas dokumentasi seluruh kegiatan Dinas Kominfo Provsu; 4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan; 5. Peningkatan kualitas kerjasama dengan instansi

- kominfo kabupaten/kota;
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan mitra lembaga pers dan penerbitan media;
 7. Peningkatan pemberdayaan pendapat umum;
 8. Peningkatan kualitas kerjasama dengan Bakohumas Pemerintah dan Kabupaten / Kota
 9. Peningkatan intensitas *coffee morning* dengan lembaga dan mitra lainnya;
 10. Pelatihan atau workshop kehumasan, pertemuan dan anjangsana;
 11. pengkoordinasian seluruh Pemberitaan Pemerintah Lintas Sektor dan Instansi Vertikal yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, BAKOHUMAS serta Lembaga Kemasyarakatan, dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 12. sosialisasi kebijakan program pemerintah;

Misi – Ketiga: Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan informasi multimedia yang terprogram, mudah dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*)

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk Mewujudkan Misi III :

Strategi : Meningkatkan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

- a. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi;
- b. Peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik;

- c. Peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi dapat diakses secara mudah oleh masyarakat;
- e. Pelayanan informasi melalui media online;
- f. Pengembangan dan pemuktahiran data Website Sumut Online;
- g. Pemberdayaan dan pelayanan fasilitasi melalui audio visual, media cetak, layanan informasi / media center dan bank data;
- h. Pengembangan penyelenggaraan ke pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- i. Perumusan, dan menetapkan standarisasi aplikasi untuk memudahkan proses kerja yang efisien dan efektif;
- j. Peningkatan pelayanan e-governance dengan merata sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi;
- k. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar lembaga;
- l. Penyediaan informasi dan pelayanan publik secara online;
- m. Penyediaan dan pemanfaatan piranti lunak aplikasi telematika untuk meningkatkan proses kerja pemerintahan dalam pelayanan publik;
- n. Peningkatan kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik;
- o. Pemberdayaan telematika untuk meningkatkan peran serta dunia usaha;

Tabel 6.3

HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI – 3

VISI : Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Berdaya Saing dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi			
MISI-III : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan informasi multimedia yang terprogram, mudah dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean governance</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika	Terwujudnya layanan informasi multimedia kepada publik yang mudah, cepat dan akuntabel;	Meningkatkan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi system informasi; 2. Peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik; 3. Peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi; 4. Peningkatan pemanfaatan teknologi agar pelayanan informasi dapat diakses secara mudah oleh masyarakat; 5. Pelayanan informasi melalui media online; 6. Pengembangan dan pemuktahiran data Website Sumut Online; 7. Pemberdayaan dan pelayanan fasilitasi melalui audio visual, media cetak, layanan informasi / media center dan bank data; 8. Pengembangan penyelenggaraan ke pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 9. Perumusan, dan menetapkan standarisasi aplikasi untuk memudahkan proses kerja yang efisien dan efektif; 10. Peningkatan pelayanan e-governance dengan merata sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan

- pemanfaatan teknologi informasi;
11. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar lembaga;
 12. Penyediaan informasi dan pelayanan publik secara online;
 13. Penyediaan dan pemanfaatan piranti lunak aplikasi telematika untuk meningkatkan proses kerja pemerintahan dalam pelayanan publik;
 14. Peningkatan kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik;
 15. Pemberdayaan telematika untuk meningkatkan peran serta dunia usaha;

Misi – Empat: Memanfaatkan dan mengembangkan sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses informasi guna mewujudkan informasi yang transparan dan akuntabel

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk Mewujudkan Misi IV :

Strategi : Meningkatkan kualitas sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses informasi yang transparan dan akuntabel

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

- a. Pertunjukan media tradisional di televisi;
- b. Pertunjukan media tradisional di Kabupaten/Kota;
- c. Koordinasi dan kelompok informasi masyarakat dengan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka penyebaran informasi;
- d. Pemberian pembinaan kepada kelompok informasi dan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka pemberdayaannya untuk meneruskan informasi kepada masyarakat lingkungannya;
- e. Sosialisasi informasi melalui Mobil Unit Siaran;
- f. Penerbitan untuk sosialisasi informasi;

- g. Penerbitan Tabloid Pemerintah;
- h. Dukungan dan keikutsertaan dalam berbagai pameran, baik PRSU maupun pameran lainnya;
- i. Publikasi melalui media ruang dalam (indoor) dan media luar ruang (baliho, spanduk, banner, billboard);
- j. Diseminasi informasi melalui sarana radio, televisi dan surat kabar yang ada di Sumatera Utara;
- k. Dialog interaktif di televisi siaran dan radio siaran;;

Tabel 6.4

HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI – 4

VISI : Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Berdaya Saing dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi				
MISI-IV : Memanfaatkan dan mengembangkan sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses informasi guna mewujudkan informasi yang transparan dan akuntabel				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi tradisional, cetak dan modern	Terwujudnya pemerataan akses dan pemanfaatan jaringan informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi;	Meningkatkan kualitas sarana desiminasi informasi dalam upaya pemerataan akses yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. pertunjukan media tradisional di televisi; 2. pertunjukan media tradisional di Kabupaten/Kota; 3. koordinasi dan kelompok informasi masyarakat dengan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka penyebaran informasi; 4. pemberian pembinaan kepada kelompok informasi dan lembaga-lembaga informasi lainnya dalam rangka pemberdayaannya untuk meneruskan informasi kepada masyarakat lingkungannya; 5. sosialisasi informasi melalui Mobil Unit Siaran; 6. penerbitan untuk sosialisasi informasi; 7. melaksanakan penerbitan Tabloid Pemerintah; 8. dukungan dan keikutsertaan dalam pameran, baik PRSU maupun pameran lainnya; 9. publikasi melalui media ruang dalam (indoor) dan luar ruang (baliho, 	

- spanduk, banner, billboard);
10. diseminasi informasi melalui sarana radio, televisi dan surat kabar yang ada di Sumatera Utara;
 11. dialog interaktif di televisi siaran dan di radio;

Misi – Kelima: Membina dan mengoptimalkan kerjasama dengan mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam meningkatkan pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk Mewujudkan Misi IV :

Strategi : Meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin jasa titipan untuk kantor cabang dan loket pelayanan operator;;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi (*cable duct*) lintas kabupaten kota atau jalan provinsi;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus, kawat atau *fiber optic* (FO), untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- d. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang;
- e. Pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi dan penerapan standar teknis dan standar pelayanan dalam bentuk sertifikat dan label yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel untuk alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi;
- f. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi;
- g. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi;
- h. Pemetaan jaringan telekomunikasi, pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;

- i. Koordinasi pemberian ijin pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- j. Pengawasan pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- k. Koordinasi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dan pengawasan dalam rangka pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dan Universal Service Obligation (USO) di bidang telekomunikasi;
- l. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
- m. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan media massa penyiaran;
- n. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan media massa televisi; dan jaringan tetap lokal wireline (end to end), TV Cable cakupan provinsi.
- o. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi dan masyarakat pos, telekomunikasi dan media massa penyiaran untuk bidang Pos dan Telekomunikasi;
- p. Pelayanan informasi pos, informasi telekomunikasi melalui media massa;

Tabel 6.5

HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI – 5

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Berdaya Saing dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi		
MISI-IV :	Membina dan mengoptimalkan kerjasama dengan mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam meningkatkan pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah,		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi.	Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan jaringan pos dan telekomunikasi.	Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja pos dan telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin jasa titipan untuk kantor cabang; loket pelayanan operator; pemberian ijin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi (<i>cable duct</i>) lintas kabupaten kota atau jalan provinsi; 2. Pengumpulan dan pengolahan data untuk pemberian ijin

- penyelenggaraan telekomunikasi khusus, kawat atau *fiber optic* (FO),
3. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang;
 4. Pengawasan terhadap layanan jasa telekomunikasi; dan penerapan standar teknis dan standar pelayanan dalam bentuk sertifikat dan label yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel untuk alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi;
 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi;
 6. Pemberian bimbingan teknis di bidang pos dan telekomunikasi;
 7. Pemetaan jaringan telekomunikasi, pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
 8. Koordinasi pemberian ijin pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
 9. Pengawasan pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
 10. Koordinasi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) dan pengawasan dalam rangka pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dan Universal Service Obligation (USO) di bidang telekomunikasi;
 11. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
 12. Pengolahan data untuk evaluasi persyaratan administrasi dan data

teknis terhadap pemohonan ijin penyelenggaraan media massa penyiaran;

13. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan ijin penyelenggaraan media massa televisi; dan jaringan tetap lokal wireline (end to end), TV Cable cakupan provinsi.
14. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi dan masyarakat pos, telekomunikasi dan media massa penyiaran untuk bidang Pos, Telekomunikasi;
15. Pelayanan informasi pos, informasi telekomunikasi melalui media massa;

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)
3. Program Peningkatan Displin Aparatur (Program Rutin)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan (Program Rutin)
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Program Operasional)
7. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (Program Operasional)
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Program Operasional)
9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi (Program Operasional)

5.2 Kegiatan Operasional

Kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi. Prioritas kegiatan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 berdasarkan prioritas program sebagai berikut :

1. *Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Program Operasional), dengan kegiatan pokok :*

- a. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran
 - b. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi
 - c. Peningkatan dan pemantapan akses informasi
 - d. Pemberdayaan komunikasi sosial skala Provinsi
 - e. Diseminasi informasi Nasional dan Provinsi
 - f. Penyebaran informasi melalui penerbitan, publikasi dan pameran skala Provinsi
1. *Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (Program Operasional)*, dengan kegiatan pokok :
- a. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan institusi komunikasi dan informatika skala Provinsi
 - b. Pengembangan dokumentasi dan perpustakaan komunikasi dan informatika skala Provinsi
 - c. Pemberdayaan pendapat umum untuk komunikasi dan informatika skala Provinsi
2. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Program Operasional)*, dengan kegiatan pokok :
- a. Pengembangan Pusat Informasi Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil
 - b. Peningkatan pelayanan e-government, standarisasi dan aplikasi telematika
 - c. Pengembangan Telematika untuk mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance bagi semua Unit Kerja yang terkait dengan pelayanan publik dalam setiap proses pemberian pelayanan yang mudah, efisien dan berkualitas
3. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi (Program Operasional)*, dengan kegiatan pokok :
- a. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang

- b. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah
- c. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi.
- d. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan Provinsi.
- e. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
- f. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Provinsi
- g. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.
- h. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi skala Provinsi
- i. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.

5.3 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi pembangunan bidang Komunikasi dan informatika di Sumatera Utara sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menuangkannya dalam rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan pada Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcome* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

No	Kebijakan	Program	Indikator	Target 2018
1	Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; melalui penerapan e-Government (e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance)	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Program Operasional)	Terwujudnya kepastian legal dan menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (<i>right to know</i>) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	Terlaksananya kepastian legal dan menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (<i>right to know</i>) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
		2. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (Program Operasional)	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kemitraan	Terselenggaranya pelayanan Informasi kemitraan yang semakin baik, berkualitas dan berdaya guna
		3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Program Operasional)	Meningkatnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas	Terselenggaranya pelayanan informasi multi media yang berkualitas, efektif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah
		4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi (Program Operasional)	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa Pos dan Telekomunikasi	Terselenggaranya pelayanan jasa pos dan telekomunikasi

BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2014-2018 merupakan penjabaran dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, yang disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara dengan jelas, terarah dan tepat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara setiap tahun berjalan dengan berorientasi pada hasil yang diinginkan dari tahun 2014-2018 sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Renstra ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)
			(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	
1	Terwujudnya kepastian legal dan menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	96,00%	989 kali	949 kali	960 kali	955 kali	961 kali	
2	Meningkatnya Pelayanan Kualitas Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi	94,00%	105 kali	79 kali	81 kali	86 kali	92 kali	
3	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kemitraan	99,00%	120 kali	126 kali	130 kali	137 kali	142 kali	
4	Meningkatnya Pelayanan Informasi Multi Media yang berkualitas	91,00%	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (CUSTOMER) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2014		2015		2016		2017		2018				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 5	Sasaran 5 :			I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 thn	1 thn	2.668.366.200	1 tahun	3.076.121.130	1 tahun	3.401.733.243	1 tahun	3.763.306.568	1 tahun	4.165.777.224	5 tahun	17.075.304.363	Dinas Kominfo	
Menciptakan tata kelola	Terwujudnya sistem tata kepemerintahan			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 thn	1 thn	27.300.000		31.395.000	1 thn	34.534.500	1 thn	37.987.950	1 thn	41.786.745	5 thn	173.004.195		Dis kominfo Provsu
pemerintahan yang baik	an yang baik berdasar hukum			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 thn	1 thn	286.000.000	1 thn	328.900.000	1 thn	361.790.000	1 thn	397.969.000	1 thn	437.765.900	5 thn	1.812.424.900		Dis kominfo Provsu
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	1 thn	1 thn	277.200.000	1 thn	318.780.000	1 thn	350.658.000	1 thn	385.723.800	1 thn	424.296.180	5 thn	1.756.657.980		Dis kominfo Provsu
				4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 thn	1 thn	125.433.200	1 thn	144.248.180	1 thn	158.672.998	1 thn	174.540.298	1 thn	191.994.328	5 thn	794.889.003		Dis kominfo Provsu
				5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 thn	1 thn	73.041.000	1 thn	83.997.150	1 thn	92.396.865	1 thn	101.636.552	1 thn	111.800.207	5 thn	462.871.773		Dis kominfo Provsu
				6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 thn	1 thn	360.000.000	1 thn	414.000.000	1 thn	455.400.000	1 thn	500.940.000	1 thn	551.034.000	5 thn	2.281.374.000		Dis kominfo Provsu
				7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 thn	1 thn	60.576.000	1 thn	69.662.400	1 thn	76.628.640	1 thn	84.291.504	1 thn	92.720.654	5 thn	383.879.198		Dis kominfo Provsu

						8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 thn	1 thn	54.716.000	1 thn	62.923.400	1 thn	69.215.740	1 thn	76.137.314	1 thn	83.751.045	5 thn	346.743.499		Dis ko min fo Pro vsu
						9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 thn	1 thn	62.960.000	1 thn	72.404.000	1 thn	79.644.400	1 thn	87.608.840	1 thn	96.369.724	5 thn	398.986.964		Dis ko min fo Pro vsu
						10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 thn	1 thn	850.000.000	1 thn	977.500.000	1 thn	1.075.250.000	1 thn	1.182.775.000	1 thn	1.301.052.500	5 thn	5.386.577.500		Pro vin si
						11	Peningkatan Pengetahuan dan wawasan dibidang Komunikasi dan Informatika	Bertambahnya wawasan dibidang Komunikasi dan Informatika	1 thn	1 thn	244.740.000	1 thn	281.451.000	1 thn	309.596.100	1 thn	340.555.710	1 thn	374.611.281	5 thn	1.550.954.091		Su mat era Uta ra
						12	Rapat Kordinasi Daerah Kominfo dengan jajaran Kab/Ko	Adanya rapat koordinasi daerah Kominfo dengan Kab/Ko	-	1 kali	96.400.000	1 thn	110.860.000	1 thn	121.946.000	1 thn	134.140.600	1 thn	147.554.660	5 thn	610.901.260		So mat era Utr aa
						13	Penyediaan Jasa Pengamanan	Tersedianya jasa Pengamanan Diskominfo Provsu	1 thn	1 thn	150.000.000	1 thn	180.000.000	1 thn	216.000.000	1 thn	259.000.000	1 thn	311.040.000	5 thn	1.116.040.000		Dis ko min fo Pro vsu
						II.	Progam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	2.328.826.000	1 tahun	2.678.149.900	1 tahun	2.945.964.890	1 tahun	3.240.561.379	1 tahun	3.564.617.517	5 tahun	14.758.119.686		Dinas Komin fo
						1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan 2 unit mobil double cabin 1 mobil Avanza dan 3 unit Sepeda	4 unit mobil dan 2 unit sepeda motor	2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil	1.142.500.000	1 thn	1.313.875.000	1 thn	1.445.262.500	1 thn	1.589.788.750	1 thn	1.748.767.625	5 thn	7.240.193.875		Dis ko min fo Pro vsu
						2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 thn	1 thn	452.350.000	1 thn	520.202.500	1 thn	572.222.750	1 thn	629.445.025	1 thn	692.389.528	5 thn	2.866.609.803		Dis ko min fo Pro vsu
						3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 thn	1 thn	447.600.000	1 thn	514.740.000	1 thn	566.214.000	1 thn	622.835.400	1 thn	685.118.940	5 thn	2.836.508.340		Dis ko min fo Pro vsu
						4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 thn	1 thn	201.276.000	1 thn	231.467.400	1 thn	254.614.140	1 thn	280.075.554	1 thn	308.083.109	5 thn	1.275.516.203		Dis ko min fo Pro vsu
						5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	1 thn	1 thn	85.100.000	1 thn	97.865.000	1 thn	107.651.500	1 thn	118.416.650	1 thn	130.258.315	5 thn	539.291.465		Dis ko min fo

							kantor															Pro vsu	
							III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	184 org	184 org	211.600.000	184 org	243.340.000	184 org	267.674.000	184 org	294.441.400	323.885.540	920 org	1.340.940.940		Dinas Komin fo	
							1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	184 stel	184 stel	146.800.000	184 stel	168.820.000	184 stel	185.702.000	184 stel	204.272.200	184 stel	224.699.420	920 stel	930.293.620		Dis ko min fo Pro vsu
							2 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparaturnya Diskominfo	184 org	184 org	64.800.000	184 org	74.520.000	184 org	81.972.000	184 org	90.169.200	184 org	99.186.120	920 org	410.647.320		Dis ko min fo Pro vsu
							IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 thn	1 thn	429.114.450	1 thn	493.481.618	1 thn	556.054.780	1 thn	627.530.257	1 thn	709.327.282	5 thn	2.815.508.387		Dinas Komin fo
							1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal pegawai Diskominfo	1 thn	1 thn	115.084.550	1 thn	132.347.233	1 thn	145.581.956	1 thn	160.140.151	1 thn	176.154.166	5 thn	729.308.056		Dis ko min fo Pro vsu
							2 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan pensiun dan kenaikan pangkat	1 thn	1 thn	80.914.000	1 thn	93.051.100	1 thn	102.356.210	1 thn	112.591.831	1 thn	123.851.014	5 thn	512.764.155		Dis ko min fo Pro vsu
							3 Out Bound dalam rangka peningkatan wawasan bersama pegawai Diskominfo	Adanya kegiatan Out Bound dalam rangka peningkatan wawasan bersama pegawai Diskominfo	-	1 kali 184 org	118.115.900	1 kali 184 org	135.833.285	1 kali 184 org	149.416.614	1 kali 184 org	164.358.275	1 kali 184 org	180.794.102	5 kali 920 org	748.518.176		Su ma era Uta ra
							4 Operasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terbentuknya Satgas SPIP Diskominfo provsu	1 thn	1 thn	115.000.000	1 thn	132.250.000	1 thn	158.700.000	1 thn	190.440.000	1 thn	228.528.000	5 thn	824.918.000		Dis ko min fo Pro vsu
							V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya dan semakin tertibnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 doku men	12 doku men	896.752.100	12 doku men	1.224.310.247	12 doku men	1.376.329.722	12 doku men	1.540.216.262	12 doku men	1.725.547.590	60 doku men	6.763.155.918		Dinas Komin fo
							1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan persemester SKPD Dinas Komin fo	2 dokumen	2 doku men	84.546.100	2 doku men	97.228.015	2 doku men	106.950.817	2 doku men	117.645.898	2 doku men	129.410.488	10 doku men	535.781.318		Dis ko min fo Pro vsu
							2 Penyusunan RKA Dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Diskominfo	2 dokumen	2 doku men	29.819.400	2 doku men	34.292.310	2 doku men	37.721.541	2 doku men	41.493.695	2 doku men	45.643.065	10 doku men	188.970.011		Dis ko min fo Pro vsu

						3	Kegiatan Verifikasi Dan Pembuatan Laporan Fisik Keuangan	Tersusunnya laporan fisik keuangan Diskominfo	1 dokumen	1 dokumen	68.699.350	1 dokumen	79.004.253	1 dokumen	86.904.678	1 dokumen	95.595.146	1 dokumen	105.154.660	5 dokumen	435.358.086		Dis ko min fo Pro vsu
						4	Kegiatan Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Dan Neraca Akhir Tahun	Tersusunnya laporan realisasi anggaran dan neraca akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	77.232.750	1 dokumen	88.817.663	1 dokumen	97.699.429	1 dokumen	107.469.372	1 dokumen	118.216.309	5 dokumen	489.435.522		Dis ko min fo Pro vsu
						5	Penginputan data keuangan dan aset Diskominfo	Tersedianya data aset Diskominfo	1 dokumen	1 dokumen	84.000.000	1 dokumen	96.600.000	1 dokumen	106.260.000	1 dokumen	116.886.000	1 dokumen	128.574.600	5 dokumen	532.320.600		Dis ko min fo Pro vsu
						6	Penyusunan Program, Lakip, Monitoring Dan Evaluasi	Adanya Lakip dan Laporan Evaluasi Dinas Kominfo Provsu	1 dokumen	1 dokumen	77.169.850	1 dokumen	88.745.328	1 dokumen	97.619.860	1 dokumen	107.381.846	1 dokumen	118.120.031	5 dokumen	489.036.915		Dis ko min fo Pro vsu
						7	Penyusunan Pidato Pimpinan Pemprovsu untuk mendukung kinerja Instansi	Adanya pidato Gubsu yang tersusun dan terakomodasi	1 dokumen	1 dokumen	164.609.950	1 dokumen	189.301.443	1 dokumen	208.231.587	1 dokumen	229.054.745	1 dokumen	251.960.220	5 dokumen	1.043.157.945		Dis ko min fo Pro vsu
						8	Penyusunan LKPJ dan LPPD Dinas Kominfo Provsu	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Diskominfo Provsu	1 dokumen	1 dokumen	14.313.600	1 dokumen	16.460.640	1 dokumen	18.106.704	1 dokumen	19.917.374	1 dokumen	21.909.112	5 dokumen	90.707.430		Dis ko min fo Pro vsu
						9	Bahan Paparan Dinas Kominfo Provsu	Tersedianya bahan paparan untuk Diskominfo Provsu	1 dokumen	1 dokumen	70.228.700	1 dokumen	80.763.005	1 dokumen	88.839.306	1 dokumen	97.723.236	1 dokumen	107.495.560	5 dokumen	445.049.806		Dis ko min fo Pro vsu
						10	Penyusunan Renstra Dinas Kominfo	Tersusunnya Renstra Dinas Kominfo Provsu	1 dokumen	1 dokumen	37.300.000	1 dokumen	42.895.000	1 dokumen	47.184.500	1 dokumen	51.902.950	1 dokumen	57.093.245	5 dokumen	236.375.695		Dis ko min fo Pro vsu
						11	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah	Termonitoring dan terevaluasi Bantuan Sosial dan Hibah	12 kali	12 kali	120.048.350	12 kali	144.100.000	12 kali	172.920.000	12 kali	207.504.000	12 kali	249.004.800	60 kali	893.577.150		Su mat era Uta ra
						12	Forum Perencanaan Pembangunan di bidang Kominfo se Sumatera Utara	Terlaksananya forum perencanaan pembangunan di bidang kominfo se Sumatera Utara	-	-	-	1 kali	75.000.000	1 kali	86.250.000	1 kali	94.875.000	1 kali	104.362.500	4 kali	360.487.500		Su mat era Uta ra
						13	Penyusunan Renja Dinas Kominfo Provsu	Tersusunnya Renja Dinas Kominfo Provsu	-	-	-	1 kali	37.000.000	1 kali	44.400.000	1 kali	53.280.000	1 kali	63.936.000	4 kali	198.616.000		Dis ko min fo Pro vsu

						14	Penyusunan Operasional SOP	Tersusunnya SOP Dinas KOMinfo Provsu	1 kali	1 kali	48.386.600	1 kali	55.644.590	1 kali	63.991.300	1 kali	73.590.000	1 kali	84.628.500	5 kali	326.240.990		Dis ko min fo Pro vsu
						15	Pembinaan Penatausahaan keuangan	Meningkatnya terib administrasi keuangan	-	1 kali	20.397.450	1 kali	23.458.000	1 kali	27.000.000	1 kali	31.022.000	1 kali	35.676.000	4 kali	137.553.450		Dis ko min fo Pro vsu
						16	Rapat Evaluasi Kinerja Tahunan	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja tahunan	-	-	-	1 kali	75.000.000	1 kali	86.250.000	1 kali	94.875.000	1 kali	104.362.500	4 kali	360.487.500		Dis ko min fo Pro vsu
						VI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Terwujudnya kepastian legal dan menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	415 kali	989 kali	26.886.368.250	949 kali	23.856.434.238	950 kali	23.678.712.789	955 kali	26.106.719.217	961 kali	28.679.821.690	4804 kali	129.325.356.183	Dinas Komin fo	
						1	Lomba Poster Sumatera Utara	Terlaksananya lomba poster Sumatera Utara	-	1 kali	186.690.000	1 kali	214.693.500	1 kali	236.162.850	1 kali	259.779.135	1 kali	285.757.049	5 kali	1.183.082.534		Su mat era Uta ra
						2	Penyusunan Buku Sumatera Utara dalam gambar	Tersusunnya buku Sumatera Utara dalam Gambar	-	1 kali	179.290.000	1 kali	206.183.500	1 kali	226.801.850	1 kali	249.482.035	1 kali	274.430.239	5 kali	1.136.187.624		Dis ko min fo Pro vsu
						3	Pementasan Media Tradisional melalui Televisi	Terlaksananya Pementasan Media Tradisional di TVRI Sumut	1 kali	1 kali	23.057.250	1 kali	26.515.838	1 kali	29.167.421	1 kali	32.084.163	1 kali	35.292.580	5 kali	146.117.252		Tel evi si
						4	Pemberdayaan KIM	Adanya pemberdayaan KIM di Kab/Ko	-	8 kali	151.675.900	8 kali	174.427.285	8 kali	191.870.014	10 kali	211.057.015	10 kali	232.162.716	44 kali	961.192.930		Ka b/k o
						5	Lomba Kelompok KIM Se-Sumatera Utara	Terlaksananya Lomba KIM	1 kali	1 kali	64.937.500	1 kali	74.678.125	1 kali	82.145.938	1 kali	90.360.531	1 kali	99.396.584	5 kali	411.518.678		Su mat era Uta ra
						6	Dialog Interaktif melalui Radio Siaran	Terlaksananya dialog interaktif melalui radio siaran	22 Kali	12 kali	135.121.000	12 kali	155.389.150	12 kali	170.928.065	12 kali	188.020.872	12 kali	206.822.959	60 kali	856.282.045		RRI
						7	Dialog Interaktif melalui Televisi Siaran	Terlaksananya dialog interaktif melalui televisi siaran	22 Kali	12 kali	147.721.000	12 kali	169.879.150	12 kali	186.867.065	12 kali	205.553.772	12 kali	226.109.149	60 kali	936.130.135		TV RI

						8	Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2014	Adanya pameran di PRSU	1 kali	1 kali	86.977.200	1 kali	100.023.780	1 kali	110.026.158	1 kali	121.028.774	1 kali	133.131.651	5 kali	551.187.563		PR SU	
						9	Desiminasi Informasi melalui TV Tron	Tersebar nya informasi melalui Tv Tron	-	1 kali	312.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	312.400.000		Su mat era Uta ra
						10	Pembuatan Dan Pencetakan Kalender Pemprov	Adanya kalender Pemprov	1 kali 1500 buah	1 kali 1500 buah	126.750.000	1 kali 1500 buah	145.762.500	1 kali 1500 buah	160.338.750	1 kali 1500 buah	176.372.625	1 kali 1500 buah	194.009.888	5 kali 7500 buah	803.233.763		Dis ko min fo Pro vsu	
						11	Diskusi Panel/Sarasehan Hari Bersejarah dan Kenegaraan	Terlaksananya diskusi panel/sarasehan hari bersejarah dan kenegaraan	3 kali 70 org	3 kali 70 org	85.141.150	3 kali 70 org	97.912.323	3 kali 70 org	107.703.555	3 kali 70 org	118.473.910	3 kali 100 org	130.321.301	15 kali 380 org	539.552.239		Su mat era Uta ra	
						12	Aspirasi Publik di RRI	Adanya siaran Aspira Publik di RRI	9 kali	9 kali	101.860.400	9 kali	117.139.460	9 kali	128.853.406	9 kali	141.738.747	9 kali	155.912.621	45 kali	645.504.634		RRI	
						13	Ayo Tanya Dokter di RRI	Adanya siaran kesehatan di RRI	1 paket	1 paket	103.116.900	1 pake t	118.584.435	1 paket	130.442.879	1 paket	143.487.166	1 paket	157.835.883	5 paket	653.467.263		RRI	
						14	Anak Cerdas Kita di RRI	Adanya siaran Anak cerdas di RRI	1 paket	1 paket	103.120.100	1 pake t	118.588.115	1 paket	130.446.927	1 paket	143.491.619	1 paket	157.840.781	5 paket	653.487.542		RRI	
						15	Berita Sumut di TV Lokal	Adanya Siaran Sumut Dalam Berita di Televisi	186 kali	360 kali	450.600.000	360 kali	518.190.000	360 kali	570.009.000	360 kali	627.009.900	360 kali	689.710.890	1800 kali	2.855.519.790		RRI	
						16	Mimbar Agama Islam di TVRI	Adanya Siaran Harmoni Iman Islam di TVRI	47 kali	48 kali	420.000.000	48 kali	483.000.000	48 kali	531.300.000	48 kali	584.430.000	48 kali	642.873.000	240 kali	2.661.603.000		TV RI	
						17	Mimbar Agama Kristen Katholik/Protestan di TVRI	Adanya Siaran Harmoni Iman kristen/Katholik di TVRI	47 kali	48 kali	420.000.000	48 kali	483.000.000	48 kali	531.300.000	48 kali	584.430.000	48 kali	642.873.000	240 kali	2.661.603.000		TV RI	
						18	Mimbar Agama Hindu/Budha dan khonghucu di TVRI	Adanya Siaran Harmoni Iman Hindu/Budha di TVRI	47 kali	48 kali	420.000.000	48 kali	483.000.000	48 kali	531.300.000	48 kali	584.430.000	48 kali	642.873.000	240 kali	2.661.603.000		TV RI	
						19	Siaran Tunda di TVRI	Adanya tayangan siaran tunda di TVRI	-	1 paket	19.500.000	1 pake t	22.425.000	1 paket	24.667.500	1 paket	27.134.250	1 paket	29.847.675	5 paket	123.574.425		TV RI	
						20	Siaran Langsung di TVRI	Adanya Siaran Langsung di TVRI	-	1 paket	19.500.000	1 pake t	80.000.000	1 paket	88.000.000	1 paket	96.800.000	1 paket	106.480.000	5 paket	390.780.000		TV RI	
						21	Sosialisasi luar ruang (Media Outdoor)	Tersosialisasi/publi kasi melalui media luar ruang (media outdoor) pada kegiatan hari-hari besar	1 tahun	1 tahun	4.500.000.000	1 tahu n	5.175.000.000	1 tahun	5.692.500.000	1 tahun	6.261.750.000	1 tahun	6.887.925.000	5 paket	28.517.175.000		Su mat era Uta ra	
						22	Tabloid Bakohumas	Tersedianya Tabloid Bakohumas	-	300 exp 4 kali	36.246.875	300 exp 4 kali	41.683.906	300 exp 4 kali	45.852.297	300 exp 4 kali	50.437.527	300 exp 4 kali	55.481.279	1500 exp 20 kali	229.701.884		Su mat era Uta ra	
						23	Ekspose Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara	Adanya ekspose hari jadi Provinsi Sumatera Utara	1 kali	1 kali	105.900.000	1 kali	121.785.000	1 kali	133.963.500	1 kali	147.359.850	1 kali	162.095.835	5 kali	671.104.185		Su mat era Uta ra	

						24	Dialog Pembangunan Sumatera Utara di TV	Terlaksananya dialog pembangunan Sumut di TV	7 kali	5 kali	70.287.500	5 kali	80.830.625	5 kali	88.913.688	5 kali	97.805.056	5 kali	107.585.562	25 kali	445.422.431		TV
						25	Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab/Ko	Terlaksananya Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab/Ko	2 kali	8 kali	195.030.000	8 kali	224.284.500	8 kali	246.712.950	8 kali	271.384.245	8 kali	298.522.670	40 kali	1.235.934.365		Ka b/ko
						26	Lomba Pementasan Media Tradisional Kab/Kota Tahun 2013	Terpilihnya Pemenang Lomba Pementasan Media Tradisional Kab/Kota Tahun 2013	1 kali	1 kali	75.350.000	1 kali	86.652.500	1 kali	95.317.750	1 kali	104.849.525	1 kali	115.334.478	5 kali	477.504.253		Su mat era Uta ra
						27	Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah Barat dan Nasional	Adanya pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah Barat dan Nasional	2 kali	2 kali	37.565.000	2 kali	43.199.750	2 kali	47.519.725	2 kali	52.271.698	2 kali	57.498.867	10 kali	238.055.040		Pro vin si
						28	Talkshow Sumut Membangun di Radio	Terlaksananya Talkshow Sumut Membangun di Radio	1 kali 40 radio	1 kali 40 radio	206.030.000	1 kali 40 radio	236.934.500	1 kali 40 radio	260.627.950	1 kali 40 radio	286.690.745	1 kali 40 radio	315.359.820	5 kali 40 radio	1.305.643.015		radi o
						29	Talkshow dalam rangka HUT Provsu di Radio	Terlaksananya Talkshow dalam rangka HUT RI Provsu di Radio	1 kali 40 radio	1 kali 40 radio	206.030.000	1 kali 40 radio	236.934.500	1 kali 40 radio	260.627.950	1 kali 40 radio	286.690.745	1 kali 40 radio	315.359.820	5 kali 40 radio	1.305.643.015		radi o
						30	Talkshow Gubsu Mendengar Rakyat di Radio	Terlaksananya Talkshow Gubsu Mendengar Rakyat di Radio	1 kali 40 radio	1 kali 40 radio	206.030.000	1 kali 40 radio	236.934.500	1 kali 40 radio	260.627.950	1 kali 40 radio	286.690.745	1 kali 40 radio	315.359.820	5 kali 40 radio	1.305.643.015		radi o
						31	Talkshow Program Prioritas APBD T.A 2014 Provsu	Terlaksananya Talkshow Program Prioritas APBD T.A 2012 Provsu	1 kali 40 radio	1 kali 40 radio	206.030.000	1 kali 40 radio	236.934.500	1 kali 40 radio	260.627.950	1 kali 40 radio	286.690.745	1 kali 40 radio	315.359.820	5 kali 40 radio	1.305.643.015		radi o
						32	Talkshow Menyambut Ramadhan dan Hari Raya di Radio	Terlaksananya Talkshow Menyambut Ramadhan dan Hari Raya di Radio	1 kali 40 radio	1 kali 40 radio	206.030.000	1 kali 40 radio	236.934.500	1 kali 40 radio	260.627.950	1 kali 40 radio	286.690.745	1 kali 40 radio	315.359.820	5 kali 40 radio	1.305.643.015		radi o
						33	Talkshow Pemilihan Presiden di Radio	Terlaksananya Talkshow Kaleidoskop Akhir Tahun di Radio	1 kali 40 radio	1 kali 40 radio	206.030.000	1 kali 40 radio	236.934.500	1 kali 40 radio	260.627.950	1 kali 40 radio	286.690.745	1 kali 40 radio	315.359.820	5 kali 40 radio	1.305.643.015		radi o
						34	Iklan Layanan Masyarakat	Tersedianya iklan layanan masyarakat	2 paket	2 paket	4.636.545.000	2 pake t	5.332.026.750	2 paket	5.865.229.425	2 paket	6.451.752.368	2 paket	7.096.927.604	10 paket	29.382.481.147		Su mat era Uta ra
						35	Pagelaran pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	Terlaksananya pertemuan pekan informasi nasional	1 kali	1 kali	280.090.000	1 kali	336.108.000	1 kali	404.000.000	1 kali	404.000.000	1 kali	404.000.000	5 kali	1.828.198.000		Pro vin si
						36	Pemilihan Bintang Radio tingkat Nasional	Terpilihnya bintang Radio tingkat Nasional	-	1 kali	50.000.000	1 kali	57.500.000	1 kali	63.250.000	1 kali	69.575.000	1 kali	76.532.500	5 kali	316.857.500		RRI

						37	Pameran Inovasi	Adanya Pameran Inovasi	-	1 kali	110.000.000	1 kali	126.500.000	1 kali	139.150.000	1 kali	153.065.000	1 kali	168.371.500	5 kali	697.086.500		Su mat era Uta ra
						38	Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional (metra) di kab/ko	Tersosialisasinya pemberdayaan kelompok media tradisional (metra) di kab/ko	-	3 kali	94.823.600	3 kali	109.047.140	3 kali	119.951.854	3 kali	131.947.039	3 kali	145.141.743	15 kali	600.911.377		Ka b/k o
						39	Pembuatan studio mini di gedung Dewan Provsu	Tersedianya studio mini dikedung Dewan Provsu	-	1 kali	620.000.000	1 kali	713.000.000	-	-	-	-	-	-	2 kali	1.333.000.000		DP RD SU
						40	Pengadaan studio mini di PRSU	tersedianya studio mini di PRSU	-	1 kali	500.000.000	1 kali	575.000.000	-	-	-	-	-	-	2 kali	1.075.000.000		PR SU
						41	Biaya perbaikan dan optimalisasi perangkat stasiun relay di 10 lokasi	Tersedianya biaya perbaikan perangkat stasiun relay di 10 lokasi	-	1 paket	1.000.000.000	1 pake t	1.150.000.000	-	-	-	-	-	-	2 paket	2.150.000.000		Su mat era Uta ra
						42	Biaya Produksi Siaran Pemilu dan Pilpres 2014	Tersedianya biaya produksi siaran Pemilu dan Pilpres 2014	-	1 paket	300.000.000	1 pake t	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	300.000.000		Su mat era Uta ra
						43	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Media tradisional (metra) di kab/ko	Adanya pembinaan dan Pemberdayaan kelompok metra	-	10 kali	329.251.000	11 kali	378.638.650	12 kali	416.502.515	12 kali	458.152.767	14 kali	503.968.043	59 kali	2.086.512.975		Ka b/k o
						44	Gubsu menyapa rakyat melalui televisi siaran	Terjalannya dialog Gubsu dengan rakyat di televisi	-	40 kali	1.415.200.000	40 kali	1.627.480.000	44 kali	1.790.228.000	44 kali	1.969.250.800	48 kali	2.166.175.880	216 kali	8.968.334.680		TV
						45	Pameran/ Teknologi Tepat Guna (TTG)	Adanya pameran/expo teknologi informasi	-	1 kali	1.200.000.000	1 kali	1.380.000.000	1 kali	1.518.000.000	1 kali	1.669.800.000	1 kali	1.836.780.000	5 kali	7.604.580.000		Su mat era Uta ra
						46	Pembuatan Steager	Terlaksananya pembuatan steager	-	33 kab/k o	4.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	33 kab/k o	4.200.000.000		Su mat era Uta ra
						47	Pembuatan LED Screen Display Indoor dan Outdoor	Tersedianya LED Screen display Indoor dan Outdoor	-	1 unit	543.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	543.600.000		Su mat era Uta ra
						49	Seminar Nasional Harkitnas	Terlaksananya seminar Nasional Harkitnas	-	1 kali	132.160.875	1 kali	151.985.006	1 kali	167.183.507	1 kali	183.901.858	1 kali	202.292.043	5 kali	837.523.289		Su mat era Uta ra
						50	Rehab Steager	Adanya rehab steager	-	1 unit	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	75.000.000		Su mat era Uta ra
						51	Sosialisasi Pemilihan Legislatif Tahun 2014	Tersosialisasinya pemilihan legislatif tahun 2014	-	3 kali	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kali	400.000.000		Su mat era Uta ra
						52	Sosialisasi Pemilihan Presiden Tahun 2014	Tersosialisasinya pemilihan presiden tahun 2014	-	3 kali	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kali	400.000.000		Su mat era

																					Uta ra		
						53	Workshop Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2014	Adanya Workshop KIM	-	1 kali	67.055.000	1 kali	77.113.250	1 kali	88.681.000	1 kali	102.000.000	1 kali	117.300.00	5 kali	452.149.250		
						54	Rapat Koordinasi KIM	Adanya pertemuan kelomok Informasi Masyarakat	-	2 kali	95.000.000	2 kali	109.250.000	3 kali	125.637.500	3 kali	144.483.500	4 kali	166.200.000	14 kali	640.571.000		
						55	Talkshow dalam rangka partisipasi Politik dalam Pemilu Legislatif	Terlaksananya Talkshow dalam rangka partisipasi Politik dalam Pemilu Legislatif	-	1 kali	207.875.000	1 kali	249.450.000	1 kali	299.340.000	1 kali	359.208.000	1 kali	431.049.600	1 kali	1.546.922.600		Su mat era Uta ra
						56	Talkshow dalam rangka partisipasi Perempuan dalam Pemilu Legislatif	Terlaksananya Talkshow dalam rangka partisipasi Perempuan dalam Pemilu Legislatif	-	1 kali	207.875.000	1 kali	249.450.000	1 kali	299.340.000	1 kali	359.208.000	1 kali	431.049.600	1 kali	1.546.922.600		Su mat era Uta ra
						57	Talkshow dalam rangka Pemilih Pemula dalam Pemilu Legislatif	Terlaksananya Talkshow dalam rangka Pemilih Pemula dalam Pemilu Legislatif	-	1 kali	207.875.000	1 kali	249.450.000	1 kali	299.340.000	1 kali	359.208.000	1 kali	431.049.600	1 kali	1.546.922.600		Su mat era Uta ra
						VII	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	Meningkatnya Pelayanan Kualitas Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi	47 kali	105 kali	3.535.609.600	79 kali	1.924.096.041	81 kali	2.132.455.646	86 kali	2.340.168.709	92 kali	2.157.507.506	443 kali	12.089.837.500		Dinas Komin fo
						1	Rapat evaluasi Universal Service Obligation/kewajiban pelayanan Umum (USO/KPU)	Terlaksananya rapat evaluasi USO/KPU	-	9 kali	21.540.150	9 kali	24.771.173	10 kali	27.248.290	10 kali	29.973.119	12 kali	32.970.431	50 kali	136.503.162		Dis ko min fo Pro vsu
						2	Pameran postal di Musrenbang	Adanya pameran USO/KPU dan Jasa Titipan	-	1 kali	55.465.400	1 kali	63.785.210	1 kali	70.163.731	1 kali	77.180.104	1 kali	84.898.115	5 kali	351.492.560		Su mat era Uta ra
						3	Rapat Evaluasi Rutin Pos dan Telekomunikasi	Terlaksananya Rapat evaluasi rutin Pos dan Telekomunikasi	9 kali	9 kali	21.540.150	9 kali	24.771.173	9 kali	27.248.290	10 kali	29.973.119	12 kali	32.970.431	49 kali	136.503.162		Dis ko min fo Pro vsu
						4	Rapat Tehnis dengan Kab/kota	Terlaksananya rapat tehnis dengan Kab/Ko	1 kali	1 kali	76.265.200	1 kali	87.704.980	1 kali	96.475.478	2 kali	106.123.026	2 kali	116.735.328	7 kali	483.304.012		Ka b/k o
						5	Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembangunan kewajiban Universal dibidang telekomunikasi	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi izin bidang pos dan telekomunikasi	1 tahun	1 tahun	47.800.000	1 tahu n	54.970.000	1 tahun	60.467.000	1 tahun	66.513.700	1 tahun	73.165.070	5 tahun	302.915.770		Su mat era Uta ra
						6	Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Pos dan Telekomunikasi	Adanya pembekalan peraturan perundang-undangan Pos dan Telekomunikasi	-	1 kali	158.029.900	1 kali	181.734.385	1 kali	199.907.824	1 kali	219.898.606	1 kali	241.888.466	5 kali	1.001.459.181		Su mat era Uta ra
						7	Pembuatan banner, poster, stiker di bidang Pos dan Telekomunikasi	Tersedianya banner, poster, stiker di bidang pos dan telekomunikasi	1 paket	1 paket	25.214.100	1 pake t	28.996.215	1 paket	31.895.837	1 paket	35.085.420	1 paket	38.593.962	5 paket	159.785.534		Su mat era Uta

																			ra				
						8	Rapat Koordinasi dengan mitra kerja media massa postal, asosiasi, provider, dan organisasi radio lainnya	Adanya koordinasi dengan mitra media massa postal, asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya	9 kali	12 kali	62.206.800	12 kali	71.537.820	12 kali	78.691.602	12 kali	86.560.762	12 kali	95.216.838	60 kali	394.213.823		Dis ko min fo Pro vsu
						9	Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional Pos dan Telekomunikasi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional Pos dan Telekomunikasi	2 kali	2 kali	93.180.000	2 kali	107.157.000	3 kali	117.872.700	5 kali	129.659.970	5 kali	142.625.967	17 kali	590.495.637		Pro vin si
						10	Monitoring tehnik untuk rekomendasi bidang pos dan telekomunikasi	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembangunan kewajiban universal dibidang telekomunikasi	12 kali	12 kali	54.171.200	12 kali	62.296.880	12 kali	68.526.568	12 kali	75.379.225	12 kali	82.917.147	60 kali	343.291.020		Su mat era Uta ra
						11	Pelayanan Informasi melalui M-PLIK ke Kab/Ko	Tersedianya Biaya Operasional M-PLIK ke 33 Kab/Ko	-	12 kali	342.196.400	12 kali	393.525.860	12 kali	432.878.446	12 kali	476.166.291	12 kali	523.782.920	50 kali	2.168.549.916		Ka b/k o
						12	Digitalisasi data	Terlaksananya Digitalisasi data	12 kali	12 kali	48.020.000	12 kali	55.223.000	12 kali	60.745.300	12 kali	66.819.830	12 kali	73.501.813	60 kali	304.309.943		Su mat era Uta ra
						13	Digitalisasi Jasa titipan	Terlaksananya pendataan telekomunikasi khusus non spektrum frekuensi radio cakupan provinsi dan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi	-	2 kali	65.000.000	2 kali	74.750.000	2 kali	82.225.000	3 kali	90.447.500	4 kali	99.492.250	13 kali	411.914.750		Su mat era Uta ra
						14	Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Jasa dan Aplikasi	Tersedianya Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Jasa dan Aplikasi	-	1 tahun	91.950.000	1 tahun	105.742.500	1 tahun	116.316.750	1 tahun	127.948.425	1 tahun	140.743.268	5 thn	582.700.943		Su mat era Uta ra
						15	Penyusunan Rencana Detail Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu	Tersusunnya Penyusunan Rencana Detail Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu	-	1 tahun	302.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 thn	302.700.000		Su mat era Uta ra
						16	Perkuatan Fasilitasi jaringan Telekomunikasi untuk wilayah Blankspot	Terlaksananya Perkuatan jaringan Telekomunikasi untuk wilayah Blankspot	-	15 unit	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit	300.000.000		Su mat era Uta ra
						17	Seminar North Sumatera Connecting	Terlaksananya Seminar North Sumatera Connecting	-	1 kali	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	160.000.000		Su mat era Uta ra

																				ra	
					18	Bimtek Standarisasi Peralatan telekomunikasi	TerlaksananyaBimtek Sdnadrisasi Peralatan telekomunikasi	-	2 kali	165.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	165.000.000	Su mat era Uta ra	
					19	Bimtek peran Pemprov Sumut dalam Indonesia Nasional Single window	TerlaksananyaBimtek peran Pemprov Sumut dalam Indonesia Nasional Single window	-	2 kali	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	175.000.000	Su mat era Uta ra	
					20	Bimtek layanan Radio dan TV digital	Terlaksananya Bimtek layanan Radio dan TV digital	-	2 kali	165.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	165.000.000	Su mat era Uta ra	
					21	Bimtek Pemanfaatan Jaringan serat optik	Terlaksananya bimtek Pemanfaatan Jaringan serat optik	-	2 kali	385.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	385.000.000	Su mat era Uta ra	
					22	Sosialisasi Master Plant frekuensi Radio di Sumatera Utara	Tersosialisai Master Plant frekuensi Radio diSumatera Utara	-	1 kali	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	200.000.000	Su mat era Uta ra	
					23	Pameran Filateli	Adanya Pameran Filateli	-	1 kali	285.330.300	1 kali	328.129.845	1 kali	360.942.830	1 kali	397.037.112	-	4 kali	1.371.440.087	Su mat era Uta ra	
					24	Bimtek Pos dan Telekomunikasi	Terlaksananya Bimtek Pos dan telekomunikasi	-	1 kali	50.000.000	1 kali	57.500.000	1 kali	63.250.000	1 kali	69.575.000	2 kali	76.532.500	6 kali	316.857.500	Su mat era Uta ra
					25	Penertiban Bidang Postel	Terlaksananya penertiban bidang postel	-	8 kali	75.000.000	8 kali	75.000.000	10 kali	95.000.000	10 kali	95.000.000	12 kali	120.000.000	48 kali	460.000.000	Su mat era Uta ra
					26	Sosialisasi Pos dan Telekomunikasi	Tersosialisasinya pos dan telekomunikasi	-	1 kali	50.000.000	1 kali	57.500.000	1 kali	63.250.000	1 kali	69.575.000	2 kali	76.532.500	6 kali	316.857.500	Su mat era Uta ra
					27	Monitoring dan evaluasi menara telekomunikasi	Termonitoring dan terevalusinya menara telekomunikasi	-	1 kali	60.000.000	1 kali	69.000.000	1 kali	79.350.000	1 kali	91.252.500	1 kali	104.940500	5 kali	404.543.000	Su mat era Uta ra
					VIII	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kemitraan	99 kali	120 kali	11.354.840.065	126 kali	14.589.859.850	130 kali	13.412.322.285	137 kali	14.786.656.140	142 kali	15.735.155.526	655 kali	69.012.619.164	Dinas Komin fo
					1	Jumpa Pers Instansi	Terlaksananya jumpa pers instansi	31 kali	24 kali	395.400.000	27 kali	454.710.000	29 kali	522.916.500	30 kali	601.354.000	32 kali	691.558.000	142 kali	2.665.938.500	Dis ko min fo Pro vsu

						2	Coffee Morning dengan Stakeholder	Terlaksananya coffee morning dengan stakeholder	8 kali	8 kali	148.000.000	9 kali	170.2000.000	10 kali	195.730.000	11 kali	225.089.500	12 kali	258.853.000	50 kali	772.783.000		Dis ko min fo Pro vsu
						3	Biaya Interaksi dan Propaganda	tersedianya biaya interaksi dan propaganda	1 tahun	1 tahun	450.000.000	1 tahun	517.500.000	1 tahun	595.125.000	1 tahun	684.393.750	1 tahun	787.053.000	5 tahun	3.034.071.750		Dis ko min fo Pro vsu
						4	Kajian Isu Publik	Tersedianya analisa isu krusial dan harapan masyarakat	12 kali	12 kali	199.500.000	12 kali	229.425.000	12 kali	263.838.750	12 kali	303.414.600	12 kali	348.927.000	60 kali	1.345.105.500		Dis ko min fo Pro vsu
						5	Pertemuan Infokom/Humas Pemprov	Terlaksananya pertemuan infokom/humas pemprov	1 kali	1 kali	132.000.000	1 kali	151.800.000	1 kali	174.570.000	2 kali	200.755.500	2 kali	230.868.850	7 kali	889.994.350		Su mat era Uta ra
						6	Temu Konsultasi Bakohumas	Adanya temu konsultasi bakohumas	2 kali	8 kali	215.355.000	9 kali	247.658.500	10 kali	284.807.000	11 kali	327.529.000	12 kali	376.658.000	50 kali	1.452.007.500		Su mat era Uta ra
						7	Pembinaan Media Massa	Adanya pembinaan media massa	1 kali	1 kali	373.300.000	1 kali	429.295.000	1 kali	493.689.250	1 kali	567.743.000	1 kali	653.000.000	5 kali	2.518.000.000		Su mat era Uta ra
						8	Dokumentasi Pelaporan dan Perpustakaan Kegiatan Dinas Kominfo	Terdokumentasinya kegiatan Dinas Kominfo	12 kali	12 kali	167.900.000	12 kali	193.085.000	12 kali	212.393.500	12 kali	233.632.850	12 kali	256.996.135	60 kali	1.064.007.485		Dis ko min fo Pro vsu
						9	Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional	Adanya pertemuan bakohumas tingkat nasional, tingkat wilayah pusat dan nasional	1 kali	2 kali	85.950.000	2 kali	98.842.500	2 kali	113.669.000	2 kali	130.720.000	2 kali	150.328.000	10 kali	579.509.500		Pro vin si
						10	Eksaminasi Informasi dan kegiatan Instansi melalui Media i	Terlaksananya eksaminasi informasi dan penyiaran informasi mingguan instansi melalui media informasi	12 kali	12 kali	88.900.000	12 kali	102.235.000	12 kali	117.570.250	12 kali	135.206.000	12 kali	94.537.536	60 kali	443.911.250		TV RI
						11	Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam Rangka hari Jadi Pemprov	Terlaksananya lomba karya tulis/lomba foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov	1 kali	1 kali	138.000.000	1 kali	158.700.000	1 kali	174.570.000	1 kali	192.027.000	1 kali	211.229.700	5 kali	874.526.700		Su mat era Uta ra
						12	Forum Dialog	Adanya forum dialog ke kab/ko	4 kali	6 kali	175.216.065	7 kali	201.492.000	7 kali	231.716.000	9 kali	266.473.000	10 kali	306.444.000	39 kali	1.181.342.000		Ka b/ko
						13	Pembuatan Resume Berita	Adanya resume berita	-	1 tahun	135.000.000	1 tahun	155.250.000	1 tahun	178.537.500	1 tahun	205.319.000	1 tahun	326.116.000	5 tahun	1.000.222.500		Dis ko min fo Pro vsu

						13	Dokumentasi kegiatan Gubsu/Wagubsu dan Unjukrasa di Lingkungan Pemprov	Terdokumentasinya kegiatan Gubsu/Wagubsu dan unjukrasa di lingkungan Pemprov	12 kali	12 kali	54.480.000	12 kali	62.652.000	12 kali	68.917.200	12 kali	75.808.920	12 kali	83.389.812	60 kali	345.247.932		Dis ko min fo Pro vsu
						14	Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis Dalam rangka Mendukung Good Government	Adanya pembekalan tata kepemimpinan jurnalis dalam rangka mendukung goo government	-	1 kali	114.765.000	1 kali	131.979.750	1 kali	145.177.725	1 kali	159.695.498	1 kali	175.665.047	5 kali	727.283.020		Su mat era Uta ra
						15	Pencerdasan Politik bagi jurnalis guna mendukung Media Massa Mensukseskan Tahun Politik Sumut	Adanya pencerdasan politik guna mendukung media massa mensukseskan tahun politik sumut	-	1 kali	35.787.000	1 kali	41.155.050	1 kali	45.270.555	1 kali	49.797.611	1 kali	54.777.372	5 kali	226.787.587		Su mat era Uta ra
						16	Pembekalan Peran Media Massa dalam memberhasilkan Program-program Strategis Sumatera Utara Mendukung Pembangunan Nasional	Adanya pembekalan peran media massa dalam memberhasilkan program-program strategis sumut mendukung pembangunan nasional	=-	1 kali	52.337.000	1 kali	60.187.550	1 kali	66.206.305	1 kali	72.826.936	1 kali	80.109.629	5 kali	331.667.420		Su mat era Uta ra
						17	Pelatihan Bidang Photography	Terlaksananya pelatihan bidang photography	-	1 kali	200.850.000	1 kali	230.977.500	1 kali	254.075.250	1 kali	279.482.775	1 kali	307.431.053	5 kali	1.272.816.578		Su mat era Uta ra
						18	Pelatihan Bidang Tulisan Berita	Terlaksananya bidang tulisan berita	-	1 kali	200.850.000	1 kali	230.977.500	1 kali	254.075.250	1 kali	279.482.775	1 kali	307.431.053	5 kali	1.272.816.578		Su mat era Uta ra
						19	Lomba Foto destinasi wisata & Atraksi Budaya Sumatera Utara	Terlaksananya lomba foto destinasi wisata & atraksi budaya sumut	-	1 kali	398.900.000	1 kali	458.735.000	1 kali	504.608.500	1 kali	555.069.350	1 kali	610.576.285	5 kali	2.527.889.135		Su mat era Uta ra
						20	Lomba Foto Pembangunan & Realitas Sosial di Sumatera Utara	Terlaksananya lomba foto pembangunan & realitas sosial di sumut	-	1 kali	398.900.000	1 kali	458.735.000	1 kali	504.608.500	1 kali	555.069.350	1 kali	610.576.285	5 kali	2.527.889.135		Su mat era Uta ra
						21	Lomba Karya Tulis Umum	Terlaksananya lomba karya tulis umum	-	1 kali	189.050.000	1 kali	217.407.500	1 kali	239.148.250	1 kali	263.063.075	1 kali	289.369.383	5 kali	1.198.038.208		Su mat era Uta ra
						22	Photography dan Jurnalistik	Terlaksananya photography dan jurnalistik	-	1 kali	147.950.000	1 kali	170.142.500	1 kali	187.156.750	1 kali	205.872.425	1 kali	226.459.668	5 kali	937.581.343		Su mat era Uta ra
						23	Pemotretan 8 Etnis di Sumatera Utara	Terlaksananya pemotretan 8 etnis di Sumatera utara	-	1 kali	199.950.000	1 kali	229.942.500	1 kali	252.936.750	1 kali	278.230.425	1 kali	306.053.468	5 kali	1.267.113.143		Su mat era Uta ra

						24	Peningkatan wawasan Wartawan ke luar Provinsi	Adanya peningkatan wawasan wartawan ke luar provinsi	-	1 kali	844.500.000	1 kali	971.175.000	1 kali	1.068.292.500	1 kali	1.175.121.750	1 kali	1.292.633.925	5 kali	5.351.723.175		Pro vin si
						25	Lomba karikatur untuk masyarakat Umum di Provsu	Terlaksananya lomba karikatur untuk masyarakat umum di provsu	-	1 kali	73.500.000	1 kali	84.525.000	1 kali	92.977.500	1 kali	102.275.250	1 kali	112.502.775	5 kali	465.780.525		Su mat era Uta ra
						26	Lomba Presenter/ pembawa acara untuk masyarakat umum	Terlaksananya lomba presenter/pembawa acara untuk masyarakat umum	-	1 kali	75.000.000	1 kali	86.250.000	1 kali	94.875.000	1 kali	104.362.500	1 kali	114.798.750	5 kali	475.286.250		Su mat era Uta ra
						27	Pelatihan dan Pembekalan Ujian Kompetensi Wartawan (UKM)	Terlaksananya Pelatihan dan Pembekalan Ujian Kompetensi Wartawan (UKM)	-	1 kali	90.000.000	1 kali	103.500.000	1 kali	113.850.000	1 kali	125.235.000	1 kali	137.758.500	5 kali	570.343.500		Su mat era Uta ra
						28	Diskusi Pendalaman tentang Memory of Understanding (Nota Kesepahaman) antara Dewan Pers dan Polri tentang penanganan Delik Pers.	Terlaksananya Diskusi Pendalaman tentang Memory of Understanding (Nota Kesepahaman) antara Dewan Pers dan Polri tentang penanganan Delik Pers.	-	2 kali	75.000.000	2 kali	86.250.000	2 kali	94.875.000	2 kali	104.362.500	2 kali	114.798.750	10 kali	475.286.250		Su mat era Uta ra
						29	Diskusi pendalaman tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Terlaksananya Diskusi pendalaman tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	-	2 kali	80.000.000	2 kali	92.000.000	2 kali	101.200.000	3 kali	111.320.000	3 kali	122.452.000	12 kali	506.972.000		Su mat era Uta ra
						30	Pelatihan tentang Teknik Penulisan Berita yang baik dan Benar	Terlaksananya Pelatihan tentang Teknik Penulisan Berita yang baik dan Benar	-	1 kali	80.000.000	1 kali	92.000.000	1 kali	101.200.000	1 kali	111.320.000	1 kali	122.452.000	5 kali	506.972.000		Su mat era Uta ra
						31	Pendidikan tentang Penulisan Artikel	Terlaksananya Pendidikan tentang Penulisan Artikel	-	1 kali	80.000.000	1 kali	92.000.000	1 kali	101.200.000	1 kali	111.320.000	1 kali	122.452.000	5 kali	506.972.000		Su mat era Uta ra
						32	Pendidikan tentang Teknik Investigative Reporting	Terlaksananya Pendidikan tentang Teknik Investigative Reporting	-	1 kali	80.000.000	1 kali	92.000.000	1 kali	101.200.000	1 kali	111.320.000	1 kali	122.452.000	5 kali	506.972.000		Su mat era Uta ra
						33	Lomba karya Tulis untuk masyarakat Umum dalam rangka hari Jadi Pemerintah Provsu	Terlaksananya lomba karya tulis untuk masyarakat umum dalam rangka hari jadi pemprovsu	1 kali	1 kali	72.000.000	1 kali	82.800.000	1 kali	91.080.000	1 kali	100.188.000	1 kali	110.206.800	5 kali	456.274.800		Su mat era Uta ra
							Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Hibah	Termonitoring dan terevaluasinya bantuan hibah dan sosial	-	1 tahun	120.000.000	1 tahun	138.000.000	1 tahun	158.700.000	1 tahun	182.505.800	1 tahun	209.880.750	5 tahun	809.086.550		Su mat era Uta ra

						Iklan Layanan Masyarakat, Advetorial dan galeri	Tersedianya iklan layanan Masyarakat dan advetorial	1 tahun	1 tahun	4.986.500.000	1 tahun	5.734.475.000	1 tahun	5.734.475.000	1 tahun	5.734.475.000	1 tahun	5.734.475.000	5 thn	27.924.400.000		Su mat era Uta ra
						IX Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya pelayanan informasi multi media yang berkualitas	1 tahun	1 tahun	1.685.650.210.150	1 tahun	18.571.534.474	1 tahun	21.036.739.691	1 tahun	22.417.098.111	1 tahun	24.700.881.086	5 tahun	121.809.307.820	Dinas Komin fo	
						1 Peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui website sumutprov.go.id	Adanya peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui website	1 tahun	1 tahun	229.536.100	1 tahun	263.966.515	1 tahun	290.363.167	1 tahun	319.399.483	1 tahun	351.339.431	5 thn	1.454.604.696		Su mat era Uta ra
						2 Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Teknologi Informasi Komunikasi	Adanya peningkatan dan pengembangan sumber daya teknologi	1 tahun	1 tahun	160.811.050	1 tahun	184.932.708	1 tahun	203.425.978	1 tahun	223.768.576	1 tahun	246.145.434	5 thn	1.019.083.746		Su mat era Uta ra
						3 Pemakaian internet Access dan Lokal Link dari Provider ke Pemprov	Lancarnya internet access dan local link dari Provider ke pemprov	1 tahun	1 tahun	1.006.100.000	1 tahun	1.157.015.000	1 tahun	1.272.716.500	1 tahun	1.399.988.150	1 tahun	1.539.986.965	5 thn	6.375.806.615		Su mat era Uta ra
						4 Pembuatan Audiovisual LKPJ Gubsu	adanya audio visual LKPJ Gubsu	1 dokumen	1 dokumen	107.437.000	1 dokumen	123.552.550	1 dokumen	135.907.805	1 dokumen	149.498.586	1 dokumen	164.448.444	5 dokumen	680.844.385		Su mat era Uta ra
						5 Monitoring dan evaluasi server, peralatan multimedia dan jaringan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi server, peralatan multimedia dan jaringan	1 tahun	1 tahun	446.320.000	1 tahun	513.268.000	1 tahun	564.594.800	1 tahun	621.054.280	1 tahun	683.159.708	5 thn	2.828.396.788		Su mat era Uta ra
						6 Optimalisasi Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi SKPD Pemprov	Terlaksananya Optimalisasi Pengembangan Teknologi Informasi SKPD Pemprov	-	1 paket	210.600.000	1 paket	242.190.000	1 paket	266.409.000	1 paket	293.049.900	1 paket	322.354.890	5 paket	1.334.603.790		Su mat era Uta ra
						7 Operasional Pusat Informasi Publik dan media center	Terlaksananya operasional pusat informasi publik	1 tahun	1 tahun	1.667.558.850.000	1 tahun	2.100.000.000	1 tahun	2.100.000.000	1 tahun	2.100.000.000	1 tahun	2.100.000.000	5 thn	1.4.0000.000.000		Su mat era Uta ra
						8 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Sosial	Tersedianya pembuatan sisitem bantuan sosial	-	1 tahun	105.000.000	1 tahun	120.750.000	1 tahun	144.900.000	1 tahun	173.880.000	1 tahun	208.656.000	5 tahun	753.186.000		Su mat era Uta ra
						9 Biaya berlangganan LKBN Antara	Adanya biaya berlangganan LKBN Antara	1 kali	1 tahun	50.000.000	1 tahun	57.500.000	1 tahun	63.250.000	1 tahun	69.575.000	1 tahun	76.532.500	5 thn	316.857.500		Su mat era Uta ra
						10 Sosialisasi Pembangunan Pemprov dan DPRDSU dengan Perum Antara	Terlaksananya sosialisasi Pembangunan Pemprov dan DPRDSU dengan Perum Antara	1 tahun	1 tahun	226.500.000	1 tahun	260.475.000	1 tahun	286.522.500	1 tahun	315.174.750	1 tahun	346.692.225	5 tahun	1.435.364.475		Su mat era Uta ra

						11	Operasional pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	Terlaksananya Operasional pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	-	1 tahun	122.995.000	1 tahun	141.444.250	1 tahun	155.588.675	1 tahun	171.147.543	1 tahun	188.262.297	5 thn	779.437.764		Su mat era Uta ra	
						12	Pengadaan Server induk dan perangkat pendukung	Tersedianya server induk dan perangkat pendukung	1 unit	5 unit	3.200.000.000	5 unit	3.200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10 unit	6.400.000.000		Su mat era Uta ra
						13	Pembuatan Portal Pemprovsu	Terlaksananya pembuatan Portal Sumut	-	1 kali	80.000.000	1 kali	92.000.000	1 kali	101.200.000	1 kali	111.320.000	1 kali	122.452.000	5 kali	506.972.000		Su mat era Uta ra	
						14	Pengembangan dan pemutakhiran website diskominfo	Adanya pengembangan dan pemutakhiran website Diskominfo	1 tahun	1 kali	198.000.000	1 kali	227.700.000	1 kali	250.470.000	1 kali	275.517.000	1 kali	303.068.700	5 kali	1.254.755.700		Su mat era Uta ra	
						15	Koordinasi antar Kab/Ko tentang Media Center	Adanya koordinasi antar kab/ko tentang media center	-	2 kali	71.460.000	2 kali	82.179.000	2 kali	90.396.900	2 kali	99.436.590	2 kali	109.380.249	10 kali	452.852.739		Su mat era Uta ra	
						16	Pelatihan Bidang Videography	Terlaksananya pelatihan bidang videography	-	1 kali	200.850.000	1 kali	230.977.500	1 kali	254.075.250	1 kali	279.482.775	1 kali	307.431.053	5 kali	1.272.816.578		Su mat era Uta ra	
						17	Lomba Blogger Sumut 2014	Terlaksananya lomba blogger sumut 2014	-	1 kali	190.150.000	1 kali	218.672.500	1 kali	240.539.750	1 kali	264.593.725	1 kali	291.053.098	5 kali	1.205.009.073		Su mat era Uta ra	
						18	Lomba Ide Kreatif Aplikasi Mobile se Sumatera Utara	Terlaksananya ide kreatif aplikasi mobile se sumut	-	1 kali	190.150.000	1 kali	218.672.500	1 kali	240.539.750	1 kali	264.593.725	1 kali	291.053.098	5 kali	1.205.009.073		Su mat era Uta ra	
						19	Lomba Hacker se Sumatera Utara	Terlaksananya Lomba hacker se Sumatera Utara	-	1 kali	189.050.000	1 kali	217.407.500	1 kali	239.148.250	1 kali	263.063.075	1 kali	289.369.383	5 kali	1.198.038.208		Su mat era Uta ra	
						20	Pelatihan dan Seminar Aplikasi Open Source	Adanya pelatihan dan seminar aplikasi open source	-	1 kali	101.950.000	1 kali	117.242.500	1 kali	128.966.750	1 kali	141.863.425	1 kali	156.049.768	5 kali	646.072.443		Su mat era Uta ra	
						21	Penyusunan Sistem Informasi Data Elektronik	Tersusunnya sistem informasi data elektronik	-	1 kali	186.950.000	1 kali	214.992.500	1 kali	236.491.750	1 kali	260.140.925	1 kali	286.155.018	5 kali	1.184.730.193		Su mat era Uta ra	
						22	Lomba design website	Terlaksananya lomba design website	-	1 kali	190.150.000	1 kali	218.672.500	1 kali	240.539.750	1 kali	264.593.725	1 kali	291.053.098	5 kali	1.205.009.073		Su mat era Uta ra	
						23	Kegiatan Peliputan Gubsu/Wagubsu/sekda melalui PIP	Adanya kegiatan peliputan Gubsu/Wagubsu/Sekda melalui PIP	-	1 tahun	254.100.000	1 tahun	292.215.000	1 tahun	321.436.500	1 tahun	353.580.150	1 tahun	388.938.165	5 kali	1.610.269.815		Su mat era Uta ra	

																			ra				
						24	Kelancaran Tugas Para staf PIP dalam rangka mendukung kegiatan Gubsu, Wagubsu, Sekdaprovsu diluar jam dinas seksi PIP Diskominfo Provsu	Adanya kelancaran tugas para staf PIP dalam rangka mendukung kegiatan Gubsu,Wagubsu, Sekdaprovsu di luar jam dinas seksi PIP	-	1 tahun	300.000.000	1 tahun	345.000.000	1 tahun	379.500.000	1 tahun	417.450.000	1 tahun	459.195.000	5 kali	1.901.145.000		Su mat era Uta ra
						25	Pembuatan Jingle Pemilihan Presiden	Adanya Jingle Pemilihan Presiden	-	1 kali	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	150.000.000		Su mat era Uta ra
						26	Pembuatan Jingle Pemilihan Legislatif	Adanya Jingle Pemilihan Legislatif	-	1 kali	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	150.000.000		Su mat era Uta ra
						27	Peliputan Pemilu Legislatif	Terlaksananya peliputan pemilu legislatif	-	1 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200.000.000		Su mat era Uta ra
						28	Peliputan Pemilu Presiden Tahun 2014	Terlaksananya peliputan pemilu presiden tahun 2014	-	1 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200.000.000		Su mat era Uta ra
						29	Bimtek Aplikasi	Terlaksananya bimtek aplikasi	-	-	-	6 kali	120.000.000	6 kali	132.000.000	6 kali	145.200.000	6 kali	159.720.000	24 kali	556.920.000		Su mat era Uta ra
						30	Pengembangan dan Pemutakhiran Aplikasi pendukung e-Gov	Adanya pengembangan dan pemutakhiran aplikasi pendukung e-gov	-	-	-	12 bulan	88.000.000	12 bulan	96.800.000	12 bulan	106.480.000	12 bulan	117.128.000	48 bulan	408.408.000		Su mat era Uta ra
						31	Layanan Bantuan TIK bagi SKPD	Adanya layanan bantuan TIK bagi SKPD	-	-	-	12 bulan	82.500.000	12 bulan	90.750.000	12 bulan	99.825.000	12 bulan	109.807.500	48 bulan	382.882.500		Su mat era Uta ra
						32	Pengembangan dan Pengamanan Infrastruktur TIK	Adanya pengembangan dan pengamanan infrastruktur TIK	-	-	-	12 bulan	110.000.000	12 bulan	121.000.000	12 bulan	133.100.000	12 bulan	146.410.000	48 bulan	510.510.000		Su mat era Uta ra
						33	Pembuatan SOP Pelayanan TIK	Adanya SOP pelayanan TIK	-	-	-	3 bulan	120.000.000	3 bulan	132.000.000	3 bulan	145.200.000	3 bulan	159.720.000	12 bulan	556.920.000		Su mat era Uta ra
						34	Pengelolaan Data Sistem Absensi Elektronik Pemprov	Terlaksananya pengelolaan data sistem absensi elektronik pemprov	-	-	-	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	121.000.000	12 bulan	133.100.000	48 bulan	464.100.000		Su mat era Uta ra

						35	Gerak Pembangunan Sumut	Tersedianya dokumentasi tentang pembangunan sumut	-	-	-	12 bulan	137.925.000	12 bulan	151.717.500	12 bulan	166.889.250	12 bulan	183.578.175	48 bulan	640.109.925		Su mat era Uta ra
						36	Layanan i-Media (TV display ANTARA) Pemprovsumut	Tersedianya layanan i-media pemprovsumut	-	-	-	12 bulan	291.400.000	12 bulan	320.540.000	12 bulan	352.594.000	12 bulan	387.853.400	48 bulan	1.352.387.400		Su mat era Uta ra
						37	Pembuatan Softcopy North Sumatera Utara	Adanya Softcopy North Sumatera Utara	-	-	-	-	-	1 Paket	650.000.000	-	-	-	-	1 paket	650.000.000		Su mat era Uta ra
						38	Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	TERSosialisasinya tata Naskah Dinas Elektronik	-	1 kali	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	65.000.000		Su mat era Uta ra
						39	Pelatihan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Meningkatnya SDM tentang tata Naskah Dinas	-	2 kali	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kali	80.000.000		Su mat era Uta ra
						40	Rapat Koordinasi TIK bersama SKPD dan kab/ko se Sumatera Utara	Adanya Rapat Koordinasi TIK bersama SKPD dan kab/ko se Sumatera Utara	-	4 kali	187.000.000	4 kali	215.050.000	4 kali	258.060.000	6 kali	309.672.000	6 kali	371.606.400	24 kali	1.341.388.400		Su mat era Uta ra
						41	Operasional Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Adanya Operasional Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	-	1 tahun	183.766.450	1 tahun	211.331.418	1 tahun	253.600.000	1 tahun	304.300.000	1 tahun	365.200.000	5 tahun	1.318.200.000		Dis ko min fo Pro vsu
						42	Pengembangan Website Dinas Kominfo Provsu	Terlaksananya Pengembangan Website Dinas Kominfo Provsu	-	1 tahun	56.500.000	1 tahun	64.975.000	1 tahun	77.970.000	1 tahun	93.564.000	1 tahun	122.276.000	5 tahun	405.285.800		Dis ko min fo Pro vsu
						43	Refitalisasi Ruang Data Recovery Center (DRC)	Tersedianya Refitalisasi Ruang Data Recovery Center (DRC)	-	1 tahun	135.000.000	1 tahun	155.250.000	1 tahun	186.300.000	1 tahun	223.560.000	1 tahun	268272.000	5 tahun	968.382.000		Su mat era Uta ra
						44	Peningkatan kualitas pelayanan Informasi melalui website Diskominfo Provsu	Adanya Peningkatan kualitas pelayanan Informasi melalui website Diskominfo Provsu	-	1 tahun	180.000.000	1 tahun	207.000.000	1 tahun	248.400.000	1 tahun	298.080.000	1 tahun	357.696.000	5 tahun	1.291.176.000		Dis ko min fo Pro vsu
						45	Pelatihan pembuatan website	Meningkatnya SDM Aparatur dalam pembuatan website	-	1 tahun	145.000.000	1 tahun	166.750.000	1 tahun	200.100.000	1 tahun	240.120.000	1 tahun	288.144.000	5 tahun	1.040.114.000		Dis ko min fo Pro vsu
						46	Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu	Bertambahnya wawasan dan SDM tentang PPID Provsu	-	6 kali	231.132.150	6 kali	265.801.973	6 kali	318.962.500	6 kali	382.800.000	6 kali	459.400.000	30 kali	1.6580.100.000		Su mat era Uta ra

						47	Pembuatan system Informasi Manajemen Lakip	Adanya pembuatan system Informasi Manajemen Lakip	-	1 paket	115.000.000	1 paket	132.250.000	1 paket	158.700.000	1 paket	190.440.000	1 paket	228.528.000	5 paket	824.918.000		Dis ko min fo Provsu
						48	Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	1 tahun	1 tahun	3.872.179.400	1 tahun	4.453.006.310	1 tahun	4.898.306.941	1 tahun	5.388.137.635	1 tahun	5.926.951.399	5 tahun	24.538.581.685		Su mat era Uta ra
						49	Pengadaan Server Induk dan Perangkat Pendukung	Tersedianya Server Induk dan Perangkat pendukung	-	1 unit	315.803.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	315.803.000		Su mat era Uta ra
						50	Kegiatan Dialog/Publik/Seminar/FGD/Diskusi/Press Confrence Komisi Informasi Provsu	Terlaksananya Kegiatan Dialog/Publik/Seminar/FGD/Diskusi/Press Confrence Komisi Informasi Provsu	-	20 kali	540.000.000	20 kali	621.000.000	20 kali	683.100.000	20 kali	751.410.000	20 kali	826.551.000	100 kali	3.422.061.000		Su mat era Uta ra
						51	Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provsu	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provsu	-	24 kali	537.600.000	24 kali	618.240.000	24 kali	680.064.000	26 kali	748.070.400	26 kali	822.877.440	124 kali]	3.406.851.840		Su mat era Uta ra
						52	Kegiatan Pelatihan Mediator dan Panitera di Komisi Informasi Provsu	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Mediator dan Panitera di Komisi Informasi Provsu	-	2 kali	137.300.000	2 kali	157.895.000	2 kali	173.684.500	3 kali	191.052.950	3 kali	210.158.245	12 kali	870.090.695		Su mat era Uta ra
						53	Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Komisi Informasi Provsu ke Badan Publik	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Komisi Informasi Provsu ke Badan Publik	-	12 kali	304.080.000	12 kali	349.692.000	12 kali	384.661.200	13 kali	423.127.320	13 kali	465.440.052	62 kali	1.927.000.572		Su mat era Uta ra
						54	Penayangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik tentang Komisi Informasi Provsu	Terlaksananya Penayangan Iklan di Media Cetak dan Elektronik tentang Komisi Informasi Provsu	-	12 paket	120.000.000	12 paket	138.000.000	12 paket	151.800.000	12 paket	166.980.000	12 paket	183.678.000	60 paket	760.458.000		Su mat era Uta ra
						55	Pelaksanaan Aktivasi Edukasi dan Advokasi tentang Komisi Informasi Provsu	Terlaksananya Pelaksanaan Aktivasi Edukasi dan Advokasi tentang Komisi Informasi Provsu	-	5 kali	100.500.000	5 kali	115.575.000	5 kali	127.132.500	5 kali	139.845.750	5 kali	153.830.325	25 kali	636.883.575		Su mat era Uta ra
						56	Pengembangan Design Website	Tersedianya design website	-	1 paket	25.000.000	1 paket	28.750.000	1 paket	31.625.000	1 paket	34.787.500	1 paket	38.266.250	5 paket	158.428.750		Su mat era Uta ra
						57	Kegiatan Moneva dan penilaian PPID oleh Komisi Infoemasi Provsu	Terlaksananya Kegiatan Moneva dan penilaian PPID oleh Komisi Infoemasi Provsu	-	5 kali	138.700.000	5 kali	159.505.000	5 kali	175.455.500	7 kali	193.001.050	7 kali	212.301.155	29 kali	878.962.705		Su mat era Uta ra

						58	Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi Provsu	Terlaksananya Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Komisi Informasi Provsu	-	5 kali	115.500.000	5 kali	132.825.000	5 kali	146.107.500	5 kali	160.718.250	5 kali	176.790.075	25 kali	731.940.825		Su mat era Uta ra
						59	Kegiatan Rapat Kerja komisi Informasi Provsu	Terlaksananya Kegiatan Rapat Kerja komisi Informasi Provsu	-	1 kali	60.200.000	1 kali	69.230.000	1 kali	76.153.000	1 kali	83.768.300	1 kali	92.145.130	5 kali	381.496.430		Su mat era Uta ra
						60	Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu	Tersedianya Laporan Tahunan Komisi Informasi Provsu	-	2 kali	42.800.000	2 kali	49.220.000	2 kali	54.142.000	2 kali	59.556.200	2 kali	65.511.820	10 kali	271.230.020		Su mat era Uta ra
						61	Pembuatan CD Audio/Video tentang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provsu	Terlaksananya Pembuatan CD Audio/Video tentang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Provsu	-	1 doku men	30.000.000	1 doku men	34.500.000	1 doku men	37.950.000	1 doku men	41.745.000	1 doku men	45.919.500	5 doku men	190.114.500		Su mat era Uta ra
						62	Peningkatan SDM Komisioner Komisi Informasi Provsu dalam bidang Mediasi	Terlaksananya Peningkatan SDM Komisioner Komisi Informasi Provsu dalam bidang Mediasi	-	1 tahun	130.250.000	1 tahu n	149.787.500	1 tahun	164.766.250	1 tahun	181.242.875	1 tahun	199.367.163	5 thn	825.413.788		Su mat era Uta ra
						63	Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID dikab/ko se Sumut	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID dikab/ko se Sumut	-	1 tahun	165.240.000	1 tahu n	190.026.000	1 tahun	209.028.600	1 tahun	229.931.460	1 tahun	252.924.606	5 thn	1.047.150.666		Su mat era Uta ra
						64	Peringatan Hari Right to Know Day 28 September 2014 Acara Puncak Peringatan Right to Know Day memberikan penghargaan kepada keplala Daerah Terbaik dibidang Keterbukaan Informasi	Terlaksananya Peringatan Hari Right to Know Day 28 September 2014 Acara Puncak Peringatan Right to Know Day memberikan penghargaan kepada keplala Daerah Terbaik dibidang Keterbukaan Informasi	-	1 kali	163.750.000	1 kali	188.312.500	1 kali	207.143.750	1 kali	227.858.125	1 kali	250.643.938	5 kali	1.037.708.313		Su mat era Uta ra
						65	Diskusi Ahli tentang Sengketa Informasi	Terlaksananya Diskusi Ahli tentang Sengketa Informasi	-	1 kali	49.700.000	1 kali	57.155.000	1 kali	62.870.500	1 kali	69.157.550	1 kali	76.073.305	5 kali	314.956.355		Su mat era Uta ra
						66	Coffee Morning dan Konferensi Pers dengan media	Terlaksananya Coffee Morning dan Konferensi Pers dengan media	-	5 kali	117.600.000	5 kali	135.240.000	5 kali	148.764.000	6 kali	163.640.400	6 kali	180.004.440	27 kali	745.248.840		Dis ko min fo
						67	Dialog Publik tentang Keterbukaan Informasi	Terlaksananya Dialog Publik tentang Keterbukaan Informasi	-	1 tahun	175.100.000	1 tahu n	201.365.000	1 tahun	221.501.500	1 tahun	243.651.650	1 tahun	268.016.815	5 thn	1.109.634.965		Su mat era Uta ra

						68	Dialog Media Massa RRI, TVRI, Deli TV, dan 5 radio Swasta	Adanya dialog Media Massa RRI,TVRI,Delli TV dan 5 radio lainnya	-	1 tahun	145.650.000	1 tahun	167.497.500	1 tahun	184.247.250	1 tahun	202.671.975	1 tahun	222.939.173	5 thn	923.005.898	Su mat era Uta ra Su mat era Uta ra
						69	Kegiatan Forum diskusi Komisi Informasi provsu	Terlaksananya Kegiatan Forum diskusi Komisi Informasi provsu	-	1 tahun	122.900.000	1 tahun	141.335.000	1 tahun	169.602.000	1 tahun	203.522.400	1 tahun	244.227.000	5 thn	881.649.400	

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	IKU 2011																		
1	Jumlah Kab/Ko yang terakses informasi						4 kali, di kab/ko	4 kali, di kab/ko				4 kali, di kab/ko	4 kali, di kab/ko				100%	100%	
2	Jumlah kab/ko di Provinsi Sumatera Utara yang masih dalam kategori blank spot informasi						1 kali, 33 kab/ko	1 kali, 33 kab/ko				1 kali, 33 kab/ko	1 kali, 33 kab/ko				100%	100%	
3	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana (media) informasi di kab/ko se Provinsi Sumatera Utara						1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100%	100%	
4	Frekuensi lomba, pementasan, pagelaran, pameran dan diseminasi informasi di kab/ko						5 kali, 33 kab/ko	5 kali, 33 kab/ko				5 kali, 33 kab/ko	5 kali, 33 kab/ko				100%	100%	
5	Frekuensi dialog interaktif di televisi dan radio						36 kali	36 kali				36 kali	44 kali				98%	122,2%	
6	Jumlah edisi materi Tabloid yang tersusun						12 edisi	-				12 edisi	-				100%	100%	
7	Frekuensi pelaksanaan Harmoni Imam di TVRI						144 kali	144 kali				144 kali	140 kali				100%	97,2%	
8	Jumlah Kerja sama yang terbentuk dengan kelembagaan Kominfo; Asosiasi Kewartawan dan Penertiban Surat Kabar Lokal : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) dalam penyebaran informasi						1 kali, 80 peserta	1 kali, 50 peserta				1 kali, 80 peserta	1 kali, 50 peserta				100%	100%	
9	Frekuensi pelaksanaan pertemuan / rapat koordinasi dengan infokom/humas Pemprov						19 kali	19 kali				19 kali	19 kali				100%	100%	
10	Frekuensi Lomba karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov						1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100%	100%	
11	Jumlah Eksaminasi dan Diseminasi Informasi melalui Media						12 eksaminasi	12 eksaminasi				12 eksaminasi	12 eksaminasi				100%	100%	
12	Frekuensi pelaksanaan pertemuan / rapat koordinasi dengan mitra kerja Postel (asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya)						25 kali	25 kali				25 kali	25 kali				100%	100%	
13	Jumlah kab/ko yang sudah terlayani Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)						33 kab/ko	33 kab/ko				33 kab/ko	33 kab/ko				100%	100%	

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke...					Realisasi Anggaran pada Tahun ke...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke...					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
- BELANJA PEGAWAI	11.649.648.866	11.710.341.523	9.542.963.000	12.804.797.707		11.209.239.756	11.279.664.579	9.559.170.796	11.618.865.839		96,22	96,32	100,17	90,74			
BELANJA LANGSUNG																	
- BELANJA PEGAWAI	1.984.104.140	1.816.832.190	2.369.441.000	3.775.755.500		1.790.095.870	1.808.377.000	2.201.295.000	3.577.397.000		90,22	99,53	92,90	94,75			
- BELANJA BARANG DAN JASA	6.385.164.020	6.373.988.220	8.068.155.863	14.769.471.513		6.156.836.738	6.297.222.163	7.782.447.688	13.852.459.887		96,42	98,80	96,46	93,79			
- BELANJA MODAL	188.260.000	1.047.526.000	1.358.750.000	3.892.540.500		181.192.825	1.023.541.000	1.280.031.999	3.732.908.400		96,25	97,71	94,21	95,90			

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE...				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TUJUAN 5 :	SASARAN 5 :						
	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum	Terwujudnya kepastian legal dan menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	989 kali	949 kali	960 kali	955 kali	961 kali
			Meningkatnya Pelayanan Kualitas Pelayanan Jasa Pos dan Telekomunikasi	105 kali	79 kali	81 kali	86 kali	92 kali
			Meningkatnya Pelayanan Informasi Kemitraan	120 kali	126 kali	136 kali	137 kali	142 kali
			Meningkatnya Pelayanan Informasi Multi Media yang berkualitas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun

